



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**DIPLOMASI KEBUDAYAAN DALAM Mendukung  
PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN  
PERTAHANAN NEGARA:  
STUDI PROGRAM *INDONESIA ARTS AND CULTURE  
SCHOLARSHIP (IACS)* OLEH KEMENTERIAN LUAR  
NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

Tesis yang Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
dalam Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Pertahanan

**GELAR NANGGALA WSP**

**NIM: 120170103010**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI DIPLOMASI PERTAHANAN**

**BOGOR  
JANUARI 2019**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Gelar Nanggala Wahyu Sagara Putra  
NIM : 120170103010  
Program Studi : Diplomasia Pertahanan  
Judul : Diplomasia Kebudayaan Dalam Mendukung  
Pencapaian Kepentingan Nasional dan  
Pertahanan Negara: Studi Program *Indonesia Arts  
and Culture Scholarship (IACS)* oleh Kementerian  
Luar Negeri Republik Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Pertahanan pada Program Studi Diplomasia Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Makarim Wibisono, Ph.D  
Pembimbing II : Laksda TNI Dr. Supartono, M.M  
Penguji I : Drs. Sutrimo, M.M., M.Si  
Penguji II : Surryanto D.W, M.H., M.M  
Penguji III : Agus Adriyanto, S.T., M.M



( )  
( )  
( Sutrimo )  
( )  
( )

Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : 29 Januari 2019

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/Undang-Undang yang berlaku.

Bogor, 29 Januari 2019



Gelar Nanggala WSP

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Gelar Nanggala Wahyu Sagara Putra

NIM : 120170103010

Program Studi : Diplomasia Pertahanan

Fakultas : Strategi Pertahanan

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Diplomasia Kebudayaan dalam Mendukung Pencapaian Kepentingan Nasional dan Pertahanan Negara: Studi Program *Indonesia Arts and Culture Scholarship (IACS)* oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari Tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 29 Januari 2019

Gelar Nanggala WSP

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya lah saya berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya pun menyadari bahwa tesis ini tidak akan mampu terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP selaku Rektor Universitas Pertahanan Indonesia
2. Mayjen TNI Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia
3. Prof. Makarim Wibisono, Ph.D sebagai dosen pembimbing 1 yang telah membimbing, memberikan ide, arahan, dan dukungannya dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Laksda TNI Dr. Supartono, M.M selaku Wakil Rektor II, sekaligus dosen pembimbing 2.
5. Kepada seluruh dosen penguji, bapak Drs. Sutrimo, M.M., M.Si, bapak Surryanto D.W, M.H., M.M, dan bapak Agus Adriyanto, S.T., M.M
6. Dr. Nur Hassan Wirajuda (Menteri Luar Negeri RI 2001-2009), Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI), Arief Ilham Ramadhan (Pejabat Fungsional Diplomat Muda, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI), dan Halen Parti Warami sebagai narasumber penelitian ini. Terima kasih atas informasi dan kerjasamanya yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik.
7. Kepada orang tua saya, terima kasih atas doa dan dukungan tanpa henti yang diberikan kepada saya
8. Kepada seluruh dosen Prodi Diplomasi Pertahanan serta Sesprodi Diplomasi Pertahanan Kol. Dr. Jonni Mahroza, S.IP.,

M.Sc, MA. Dan juga Mbak Eka dan Wak Sandi sebagai staff prodi Diplomasi Pertahanan. Terima kasih atas bantuannya kepada kami semua, mahasiswa Diplomasi Pertahanan Cohort 4.

9. Kepada keluarga baru saya yakni seluruh teman-teman Diplomasi Pertahanan Cohort 4. Terima kasih atas segala kesenangan dan waktu-waktu berharga bersama kalian semua. Semoga kita dapat bertemu dan berbagi cerita-cerita hebat masing-masing
10. Kepada seluruh anggota pleton 4B Boomerang, terutama Pak Basri, Bu Niken, Pak Ginanjar, terima kasih telah menjadi keluarga baru saat pertama kali memulai perjalanan di Universitas Pertahanan
11. Kepada teman-teman terdekat di Unhan, Sarah Astried (Acit), Fiany Intan (Intan), Deandra, Arau, dan Diesmi terima kasih untuk segala kesenangan dan keseruan kita bersama. Bang Daniel and Indra Wisnu, terima kasih telah menjadi figur yang mengajarkan saya untuk selalu baik kepada semua orang. Untuk Felani, Mbak Chayu dan Mbak Cindy, terima kasih atas semua perhatian dan telah menjadi 'kakak' perempuan saya. Untuk Raisa, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik. Untuk Ongky Harja Winata (mas Ongky), terima kasih atas segala pengalaman yang diberikan dan telah menjadi abang saya di Unhan. Sukses untuk kita semua.
12. Kepada sahabat saya Echa Chairani, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.
13. Dan tentunya untuk seluruh teman-teman Universitas Pertahanan Cohort 9, saya bersyukur dapat bertemu dan mengenal kalian semua.

Dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman, saya menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dalam tesis ini. Untuk itu, segala masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan agar tercipta tesis yang lebih

baik lagi. Akhir kata, saya berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi pengembangan kajian dan implementasi diplomasi pertahanan demi keutuhan dan kedaulatan Negara Indonesia.

Bogor, 29 Januari 2019

Gelar Nanggala WSP

## ABSTRAKSI

### DIPLOMASI KEBUDAYAAN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN PERTAHANAN NEGARA: STUDI PROGRAM *INDONESIA ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP (IACS)* OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### GELAR NANGGALA WAHYU SAGARA PUTRA

Situasi politik global cenderung bersifat dinamis. Setiap negara di dunia dituntut untuk selalu siap dalam mengambil tindakan demi memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tindakan setiap negara cenderung mengikuti tren dan situasi tataran global yang tengah terjadi. Untuk itu setiap negara dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi segala tantangan, termasuk potensi ancaman. Bentuk ancaman pun kini menunjukkan pergeseran, dari ancaman tradisional yang bersifat militer, menjadi ancaman nontradisional yang lebih kompleks. Dalam menyikapi bentuk ancaman-ancaman tersebut Indonesia memiliki sistem pertahanan semesta, yang berarti memadukan segala sumber daya nasional sebagai unsur kekuatan pertahanan. Tidak hanya kekuatan militer saja yang diperlukan, kekuatan nirmiliter juga memiliki peran tersendiri dalam sistem pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran IACS yang merupakan program tahunan Kementerian Luar Negeri RI sebagai kekuatan pertahanan nirmiliter, dapat mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional. Disamping itu, analisis pada kontribusi terhadap pertahanan negara, khususnya pertahanan nirmiliter yang diberikan program IACS ini juga menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif, sementara data yang dibutuhkan diperoleh melalui rangkaian wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IACS mendukung pencapaian kepentingan nasional dengan membentuk citra positif negara, mempererat bahkan membangun hubungan bilateral maupun multilateral, hingga mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia. Dari perspektif pertahanan negara, IACS berkontribusi melalui aktifitas *people to people contact* yang meningkatkan kesepahaman antara Indonesia dengan negara-negara lain, sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Selain itu, aktifitas *people to people* juga meningkatkan CBM yang dimiliki Indonesia dengan pihak internasional, serta membantu terciptanya kerjasama. Meski begitu, masih diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antara Kemenlu dengan *stakeholder* terkait agar program ini lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Kata kunci : CBM, Diplomasi, IACS, Kebudayaan, Kemenlu, Kepentingan Nasional, Pertahanan.

## **ABSTRACT**

### **CULTURAL DIPLOMACY IN SUPPORTING THE NATIONAL INTEREST AND NATIONAL DEFENSE: THE STUDY OF INDONESIA ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP PROGRAM BY THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIR OF INDONESIA**

#### **GELAR NANGGALA WAHYU SAGARA PUTRA**

*The global politic that we're having is always dynamic. Thus, every single nation should be very prepared in taking any action in order to defend its national interest. Moreover, each nation must be able to face any form of challenges, including the potential threat. A shifting in terms of threat is also found, where a traditional threats that mostly come up in a form of military threats, turn into a non-traditional threats which are more complex if it's compared to the other one. As a response to this reality, Indonesia uses its total defense system, which involving all the national resources as their defense force essential. Aside from military force, nonmilitary force holds a significant role for the national defense system as well. Therefore, this research is conducted to see how IACS, an annual program brought by the Ministry of Foreign Affair of Indonesia, takes role as a non-military defense force in supporting the national interest. Other than that, this research aims to reveal how IACS contributes in the national defense, specifically as a non-military force. The method used in this study is qualitative, while numbers of interviews and literature studies are have been taken in order to obtain the data. The result shows that IACS supports Indonesia's national interest by constructing positive image of Indonesia to worldwide, strengthening and even creating the bilateral and multilateral affair, and also the embodiment of world peace. From the perspective of national defense, people to people contact activity resulted by IACS increases better understanding among nations, which minimizes the potential of conflicts. Furthermore, people to people contact activity contributes in escalating Indonesia's CBM, which led to international cooperation. Nevertheless, the writer thinks that a better coordination and synergy between the Ministry of Foreign Affair of Indonesia and related stakeholders are needed, so that this program could run more efficiently, effectively, and hit the target perfectly.*

*Keywords: CBM, Culture, Defense, Diplomacy, IACS, MoFA, National Interest*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian .....	10
1.3 Rumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB 2 KAJIAN TEORITIK.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	13
2.1.1 Konsep Kepentingan Nasional .....	13
2.1.2 Teori Diplomasi .....	15
2.1.3 Diplomasi Kebudayaan.....	19
2.1.4 Konsep Ilmu Pertahanan .....	22
2.1.5 Konsep Diplomasi Pertahanan .....	23
2.1.6 Confidence Building Measure .....	27
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	28
2.3 Kerangka Pemikiran .....	37

<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
3.1.1 Tempat Penelitian .....	40
3.1.2 Waktu Penelitian .....	40
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	40
3.2.1 Subjek Penelitian .....	40
3.2.2 Objek Penelitian .....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	43
3.5 Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	45
4.1.1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia .....	45
4.1.2 IACS (Indonesia Arts and Culture Scholarship) .....	48
4.2 Hasil Penelitian .....	52
4.2.1 Program IACS dalam Mendukung Upaya Pencapaian Kepentingan Nasional.....	52
4.2.2 Kontribusi Diplomasi Kebudayaan melalui IACS dalam Mendukung Pertahanan Negara .....	60
4.3 Pembahasan .....	64
4.3.1 Program IACS dalam Mendukung Upaya Pencapaian Kepentingan Nasional .....	65
4.3.2 Kontribusi Diplomasi Kebudayaan melalui IACS dalam Mendukung Pertahanan Negara .....	71
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Rekomendasi.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bus Wonderful Indonesia pada perhelatan Piala Dunia 2018 di Rusia sebagai bentuk diplomasi budaya .....	7
Gambar 1.2 Pembukaan IACS 2018.....	9
Gambar 2.1 Wujud Kerjasama antar negara ASEAN .....	18
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 3.1 Alur Analisis Data .....	44
Gambar 4.1 Grafik Jumlah Peserta IACS dari Tahun ke Tahun .....	49
Gambar 4.2 Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam rangkaian kegiatan program IACS.....	51
Gambar 4.3 Salah satu peserta program beasiswa IACS belajar membatik yang menjadi salah satu materi .....	58
Gambar 4.4 <i>Indonesia Channel</i> sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta program beasiswa IACS .....	59
Gambar 4.5 Presiden Joko Widodo menyambut Presiden Perancis Francois Hollande di Jakarta .....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hubungan Antara Situasi, Bentuk, Tujuan, dan Sarana Diplomasi Kebudayaan .....	21
Tabel 2.2 Kegiatan Diplomasi Pertahanan.....	25
Tabel 2.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 4.1 Tabel Tipologi CBMs.....	78

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Situasi politik dunia secara cenderung tidak stabil. Sifatnya yang dinamis, secara tidak langsung menuntut negara-negara di dunia harus selalu siap dalam menentukan sikap dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi di dunia secara global. Perkembangan lingkungan strategis semacam ini tentu berpengaruh pada penyelenggaraan pertahanan negara<sup>1</sup>. Lingkungan strategis sendiri dapat dipahami sebagai suatu area bagi aktor-aktor terkait yang dapat mempengaruhi satu sama lain, yang pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas yang terjadi antar aktor-aktor tersebut. Secara sederhana, lingkungan strategis ini menekankan pada analisa untuk memprediksi dan menganalisa perkembangan ancaman dan persaingan antar negara, baik secara regional maupun internasional<sup>2</sup>.

Lingkungan strategis inilah yang akan menentukan bagaimana sebuah negara menentukan kebijakan dalam negeri maupun luar negerinya. Penetapan kebijakan dalam negeri dan luar negeri berkaitan dengan tujuan nasional dan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Tujuan nasional Indonesia sendiri telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang didasari pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional Indonesia tersebut pada akhirnya yang menghasilkan kebijakan politik luar negeri “bebas-aktif” yang dianut Indonesia. Sementara itu, berdasar buku putih pertahanan Indonesia, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga keutuhan wilayah NKRI

---

<sup>1</sup> Buku Putih Pertahanan Indonesia. 2015. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

<sup>2</sup> Yugolastarob Komeini. 2009. Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Tenggara dan Stagnasi Postur Pertahanan Indonesia Periode 2001-2004. Jakarta: Universitas Indonesia

berdasar Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional<sup>3</sup>.

Tujuan nasional Indonesia secara umum telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4, dimana kepentingan nasional yang dimaksud termasuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional yang secara khusus yang diamanahkan terhadap Kementerian Luar Negeri terkait dengan hubungan antar bangsa. Kepentingan nasional khusus tersebut yakni:

- a. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dalam bidang multilateral,
- b. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, kerjasama kemanusiaan serta meningkatnya pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, komoditi,
- c. Perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerjasama multilateral.

Menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI bersifat permanen, sehingga keutuhan dan kedaulatan wilayah akan selalu menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional tersebut yang menjadi landasan dalam perumusan *grand strategy* ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional dapat dipengaruhi oleh faktor domestik seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, dan interaksi antar masyarakat. Keamanan nasional menjadi salah satu poin penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu negara, mengingat potensi ancaman baik secara

---

<sup>3</sup> Op. Cit. hlm 26

internal maupun eksternal yang mampu mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa.

Seiring dengan dinamika politik internasional, tren ancaman pun mulai mengalami pergeseran. Ancaman bersifat militer yang identik dalam bentuk invasi dan agresi militer kini perlahan mulai ditinggalkan. Hal ini didasari pertimbangan atas biaya yang dibutuhkan, konsekuensi dan dampak yang ditimbulkan, hingga jumlah korban jiwa yang dihasilkan. Tindakan seperti invasi militer dan agresi militer juga akan mengundang kritik dunia internasional yang berpotensi dijatuhkannya sanksi internasional, dan tentunya ini menjadi hal yang dihindari oleh setiap negara di kancah perpolitikan dunia. Menyikapi hal tersebut, pemerintah sendiri telah mempersiapkan sistem pertahanan dalam menyikapi ancaman nonmiliter. Dalam Buku Putih Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan disebutkan bahwa Kementerian atau Lembaga diluar bidang pertahanan merupakan unsur utama kekuatan pertahanan nirmiliter negara.

Selain itu, gambaran atau citra suatu negara ternyata memiliki dampak tersendiri bagi keberlangsungan negara tersebut. Tak terkecuali untuk negara berkembang seperti Indonesia. Jika kita mundur sedikit ke belakang, di era reformasi Indonesia bisa dikatakan berada di situasi yang kelam. Konflik antar etnis, aksi terorisme, bencana alam, menjadi gambaran dari Indonesia di mata internasional pada periode tersebut. Aksi pemboman tiga gereja di Surabaya pada Mei 2018 silam juga secara langsung berimbas pada citra Indonesia di mata internasional. Aksi pemboman tersebut menyebabkan sebanyak kurang lebih 13 negara telah mengeluarkan "*travel advice*" terhadap Indonesia<sup>4</sup>. Hal-hal semacam itu lah yang menjadi ancaman nonmiliter, yang jika tidak segera direspon maka bukan tidak mungkin akan berpengaruh pada minat investasi asing serta dan juga pada kerjasama yang terjalin. Dikhawatirkan hal tersebut

---

<sup>4</sup> Silvita Agmasari. 2018. Imbas Bom Surabaya, Sudah 13 Negara Keluarkan "*Travel Advice*". [Online] <https://travel.kompas.com/read/2018/05/16/192400427/imbasm-bom-surabaya-sudah-13-negara-keluarkan-travel-advice-> Diakses pada 31 Juli 2018

akan berdampak buruk ada upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia, yang salah satunya adalah upaya pertahanan negara.

Menyikapi potensi ancaman nonmiliter, pemerintah sendiri melalui kementerian dan lembaga terkait telah melakukan beragam upaya, salah satunya upaya *soft power* dalam wujud diplomasi. Berbeda dengan *hard power* yang cenderung mengedepankan kekuatan militer, *soft power* justru mengesampingkan kekuatan alutsista militer sebagai instrumennya. *Soft power* pertama kali dipopulerkan oleh Joseph Nye, dan *soft power* diartikan sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than through coercion or payments*”<sup>5</sup>. Dapat diartikan bahwa *soft power* merupakan cara mencapai tujuan suatu negara yang dilakukan tanpa menggunakan unsur paksaan. Mengingat sifatnya yang tidak menggunakan unsur paksaan, maka kekuatan *soft power* suatu negara bersumber pada budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang diterapkan<sup>6</sup>.

Kebijakan yang diterapkan oleh sebuah negara akan berpengaruh pada kekuatan *soft power* yang dimiliki negara tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan yang diterapkan suatu negara secara tidak langsung akan mencerminkan citra negara itu sendiri. Sebagai contoh, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak berpihak pada blok manapun namun tetap aktif dalam upaya perdamaian dunia. Hal ini berdampak pula pada dipercayanya Indonesia sebagai pihak mediator dalam beberapa konflik internasional.

Salah satu bentuk *soft power* yang dapat dilakukan sebuah negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya adalah melalui bentuk diplomasi budaya. Diplomasi budaya merupakan bentuk diplomasi yang memberi penekanan pada penggunaan budaya sebagai unsur utama dan akan memberikan kemungkinan partisipasi yang lebih luas<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Joseph Nye. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. SAGE Journals

<sup>6</sup> Joseph Nye. 2004. *Soft Power and American Foreign Policy*. *Political Science Quarterly*

<sup>7</sup> Manuela Aguilar. 1996. *Cultural Diplomacy and Foreign Policy: German-American Relationship*. New York: Peter Lang

Pada awalnya terdapat perdebatan mengenai apakah ada keterkaitan antara aspek budaya dengan proses perumusan kebijakan luar negeri. Pada saat itu ditemukan bahwa terdapat apa yang dinamakan dengan keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung. Dalam konteks ini, aspek keterkaitan langsung (seperti persoalan ekonomi dan keamanan) dirasa lebih penting ketimbang kaitannya dengan aspek budaya<sup>8</sup>.

Yang dimaksud dengan budaya atau kultur sendiri adalah lebih merujuk pada karakteristik masyarakat, yang dapat mencakup hal-hal seperti bahasa, agama, nilai-nilai adat, perilaku, keyakinan, serta kesenian<sup>9</sup>. Dengan kata lain, maka kaitan yang dimaksud adalah bagaimana sebuah pola perilaku yang telah tertanam dalam sebuah masyarakat tertentu, dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan dibentuk. Keyakinan bahwa aspek budaya perlu menjadi fokus dalam perumusan kebijakan internasional, ditandai dengan pemahaman dari para cendekiawan yang menyatakan bahwa apabila kita mencoba untuk memahami hubungan antara dua negara, maka analisis terhadap masyarakat terkait memang perlu diberlakukan. Aspek kultur dan hubungan internasional sendiri sebenarnya telah disinggung dalam buku *Clash of Civilization* oleh Samuel Huntington. Ia menjelaskan bahwa perbedaan paham ideologi dan identitas budaya sebuah negara mampu menyulut konflik di dunia ini<sup>10</sup>. Untuk itu, diplomasi kebudayaan dapat berperan sebagai media dalam menyuarakan ideologi dan pemahaman mengenai Indonesia, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik yang dapat terjadi akibat perbedaan budaya dan ketidaksepahaman.

Liland lebih lanjutnya menambahkan bahwa karakteristik masyarakat tertentu menjadi aspek yang penting, karena akan membantu membentuk sebuah kerangka budaya yang diperlukan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri. Yang tidak kalah penting adalah budaya ini sendiri dapat menjadi sumber kekuatan sebuah kebijakan luar

---

<sup>8</sup> Frode Liland. 1993. "Culture and Foreign Policy: An Introduction to Approaches and Theory". Journal of Institutt for Forsvarstudier.

<sup>9</sup> Li dan Karakowsky. 2001. "Do We see eye-to-eye? Implication of Cultural Differences for Cross-Cultural Management Research and Practice". The Journal of Psychology.

<sup>10</sup> Samuel P. Huntington. 1993. "The Clash of Civilization". Foreign Affairs.

negeri. Pendapat yang sama juga diberikan oleh Zhu Majie, dimana ia menjelaskan bahwa kultur dapat mempengaruhi cara berpikir aktor pengambil keputusan, yang didasari oleh nilai-nilai kebudayaan yang dianutnya<sup>11</sup>. Dengan kata lain, nilai-nilai norma perilaku yang diterapkan seorang individu, akan dijadikan sebagai filter dan navigator dalam membantu individu tersebut untuk membuat sebuah keputusan.

Disamping itu, aspek budaya ini pun memiliki peran yang cukup unik dalam hubungan internasional. Sebagai contoh, budaya dapat berperan sebagai pemersatu aktor-aktor hubungan internasional dalam proses menjalin kerjasama. Aktifitas berbasis budaya seperti pertukaran pelajar, hingga pengiriman atlet nasional dalam sebuah kompetisi internasional dapat meningkatkan hubungan baik antara negara-negara yang terlibat. Dalam praktiknya, Korea Selatan adalah salah satu negara yang menerapkan bentuk diplomasi semacam ini. Korea Selatan mengirimkan 120 musisi dan artis ke Pyongyang-Korea Utara sebagai 'agen nasional' Korea Selatan dalam praktik diplomasi kebudayaan tersebut. Proses diplomasi budaya yang berlangsung adalah pertunjukan musik oleh musisi dan artis Korea Selatan di Korea Utara<sup>12</sup>. Kim Jong Un selaku pemimpin Korea Utara menyambut hangat hal ini. Dalam kancah perpolitikan internasional Korea Utara memang dikenal sebagai negara yang eksklusif dan tertutup, bahkan dengan negara tetangga seperti Korea Selatan. Namun, melalui diplomasi budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut, ketegangan yang terjadi di antara kedua negara yang berbatasan secara langsung tersebut pun mulai mereda.

Diplomasi budaya juga dilakukan Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dengan program *Wonderful Indonesia* yang telah mendunia. Pertama kali diperkenalkan pada 2011, *Wonderful Indonesia* merupakan program unggulan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam rangka mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia secara

---

<sup>11</sup> Zhu Majie. 2002. "*The Role of Soft Power in International Relations*".

<sup>12</sup> DW. 2018. Diplomasi K-Pop Korea Selatan Yang Meriah Menggoyang Pyongyang. [Online] <https://www.dw.com/id/diplomasi-k-pop-korea-selatan-yang-meriah-menggoyang-pyongyang/a-43224685> Diakses pada 24 Juli 2018

global. Hal ini dilakukan Kementerian Pariwisata sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional, dimana bidang pariwisata mampu berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan citra Indonesia di dunia internasional yang erat hubungannya apabila dikaitkan dengan konteks kepentingan nasional dan pertahanan negara<sup>13</sup>.



Gambar 1.1 Bus Wonderful Indonesia pada perhelatan Piala Dunia 2018 di Rusia sebagai bentuk diplomasi budaya

*Wonderful Indonesia* juga telah beberapa kali diakui eksistensinya dengan mendapatkan penghargaan, salah satunya dari *United Nations World Tourism Organization*, salah satu badan turunan PBB. Hal ini juga berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dimana BPS mencatat terjadi peningkatan sebesar 21,88 persen pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2017 bila dibandingkan tahun sebelumnya<sup>14</sup>. Peningkatan ini tentu memberikan kontribusi pada pertahanan ekonomi negara melalui pendapatan devisa negara.

Bentuk diplomasi kebudayaan yang dilakukan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tersebut menunjukkan implementasi dari apa yang tertuang di Buku Putih Pertahanan Indonesia, dimana peran

<sup>13</sup> Potensi Pariwisata Indonesia. [Online] <http://indonesia.go.id/in/potensi-daerah/pariwisata> Diakses pada 27 Juli 2018

<sup>14</sup> Situs Badan Pusat Statistik. [Online] <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/1468/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2017-mencapai-1-15-juta-kunjungan-.html> Diakses pada 29 Juli 2018

Kementerian atau Lembaga diluar bidang pertahanan militer diharapkan menjadi unsur utama dalam mendukung pertahanan nirmiliter. Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian di garda terdepan negara dalam konteks hubungan internasional merupakan salah satu kementerian diluar bidang pertahanan yang memiliki peran tersendiri di dalam pertahanan negara. Kekuatan diplomasi merupakan kekuatan utama yang selalu dikedepankan oleh kementerian luar negeri dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri Indonesia demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

Hal ini jelas sejalan dengan konteks pertahanan negara yang mengedepankan pada pencapaian kepentingan nasional, dimana pertahanan negara dapat diartikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara<sup>15</sup>. Dengan begitu, kementerian luar negeri melalui berbagai upaya diplomasi dan kebijakan politik luar negerinya berkontribusi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia termasuk pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia.

Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah program *Indonesia Arts and Culture Scholarship (IACS)* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) (lihat gambar 1.2). IACS merupakan bentuk diplomasi berbasis budaya yang telah dicanangkan kementerian luar negeri Republik Indonesia sejak tahun 2003. Pada awalnya IACS sendiri hanya ditargetkan untuk negara anggota *South West Pacific Dialogue* yakni Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Timor-Leste dan Indonesia sebagai tuan rumah. Namun, seiring dengan signifikansi dan hal positif yang dirasakan oleh pemerintah maka program beasiswa budaya ini terus berkembang sehingga pesertanya meluas dari seluruh negara di dunia. Tercatat dari periode 2003 hingga 2018 program ini telah

---

<sup>15</sup> Conni Rahakundini Bakrie. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

menghasilkan sebanyak 848 alumni yang berasal dari 74 negara di dunia<sup>16</sup>.



Gambar 1.2 Pembukaan IACS 2018

Yang menjadi salah satu tujuan dari diadakannya program ini adalah menanamkan rasa kebersamaan dan tumbuhnya saling pengertian antar negara. Hal ini dimulai melalui pemahaman pemuda-pemuda dari tiap-tiap negara di dunia yang memiliki keberagaman latar belakang, agama, bahasa, adat istiadat hingga gender. Pemahaman tersebut pula yang diharapkan mampu menjaga hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal peserta, sehingga tercipta situasi yang harmonis dan damai, yang menjauhkan diri dari potensi ancaman konflik bagi negara.

IACS sendiri dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yakni program reguler dan khusus. Kedua kriteria tersebut memiliki materi dan konten yang berbeda. Selama kurang lebih 3 bulan IACS ini berlangsung, seluruh peserta akan disebar ke beberapa provinsi di Indonesia yang mewakili beberapa pulau dari ujung barat hingga timur Indonesia. Di lokasi-lokasi tersebut para peserta akan tinggal di sanggar atau universitas yang telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, untuk mempelajari kebudayaan di Indonesia. Pada tahun 2016

<sup>16</sup> Kementerian Luar Negeri RI. 2017. *2018 Indonesian Arts and Culture Scholarship*. [Online] <https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/2018-Indonesian-Arts-and-Culture-Scholarship-.aspx> Diakses pada 20 Juli 2018

kemarin contohnya, IACS diadakan di Denpasar, Padang, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan diatas, lalu bagaimana peran kementerian luar negeri Indonesia dalam mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional dan pertahanan negara melalui IACS ini? Mengingat bahwa diplomasi kebudayaan atau upaya diplomasi berbasis budaya menurut mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Soemadi Brotodiningrat, kurang diprioritaskan oleh pemerintah dimana beliau menganggap bahwa Indonesia memiliki potensi tinggi dalam hal ini<sup>17</sup>. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui program IACS, serta bagaimana program IACS sebagai bentuk diplomasi kebudayaan oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam mendukung pertahanan negara.

## **1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian**

Peneliti dalam penelitian ini akan memfokuskan pada diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui peran program IACS, dalam mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional. Sementara itu, selain fokus tersebut peneliti juga menjadikan kontribusi yang dihasilkan oleh diplomasi kebudayaan melalui IACS dalam mendukung pertahanan negara sebagai sub fokus dalam penelitian kali ini.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Fakta menunjukkan bahwa tren ancaman saat ini telah mengalami pergeseran dari ancaman militer ke ancaman nonmiliter. Oleh karena itu penguatan pertahanan nirmiliter seharusnya juga perlu diperhatikan. Peran kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur kekuatan utama pertahanan nirmiliter menjadi sangat

---

<sup>17</sup> Indah Wulandari. 2015. Diplomasi Budaya Indonesia Masih Rendah. [Online] <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/29/nwymzy346-diplomasi-budaya-indonesia-masih-rendah> Diakses pada 20 Juli 2018

signifikan. Kementerian Luar Negeri sebagai garda terdepan Indonesia yang membidangi urusan luar negeri, menjadi salah satu kementerian yang berperan sebagai unsur utama di bidang pertahanan nirmiliter.

Kementerian luar negeri RI melalui salah satu program yang rutin diadakan tiap tahun sejak tahun 2003 yaitu IACS (*Indonesia Arts and Culture Scholarship*) merupakan salah satu bentuk diplomasi kebudayaan yang berkontribusi secara unik dalam usaha pencapaian kepentingan nasional, yakni termasuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah program IACS sebagai Diplomasi Kebudayaan oleh Indonesia dapat mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional?
- b. Bagaimanakah diplomasi kebudayaan, khususnya IACS mampu mendukung pertahanan negara?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. Menganalisis program IACS sebagai bentuk diplomasi kebudayaan dalam mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia.
- b. Menganalisis IACS sebagai wujud diplomasi kebudayaan dapat mendukung pertahanan negara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap melalui penelitian ini akan terlahir perspektif baru mengenai peran diplomasi kebudayaan sebagai *soft power diplomacy* dalam mencapai kepentingan nasional dan mendukung serta menjawab tantangan dalam isu pertahanan negara. Seperti yang telah diketahui bahwa bentuk pertahanan kini telah meluas, tidak hanya pertahanan militer saja, namun juga terdapat pertahanan nirmiliter sebagaimana yang

telah disebutkan dalam buku putih pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah, agar terus memperhatikan keseimbangan dan sinergitas antara pertahanan militer dan nirmiliter sehingga sistem pertahanan semesta yang telah tertuang dalam konstitusi dapat terwujud dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang juga membahas mengenai peran diplomasi kebudayaan atau bentuk *soft-power diplomacy* lainnya, ditinjau dari upaya perwujudan kepentingan nasional dan perspektif pertahanan negara. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dalam pembentukan dan pencapaian kebijakan yang akan dillakukan di masa mendatang, terkait dengan program IACS maupun pelaksanaan diplomasi kebudayaan demi mendukung kelangsungan bangsa dan negara.

## **BAB 2**

### **KAJIAN TEORITIK**

Dalam bagian ini, akan terdiri atas tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka akan berisi mengenai pembahasan atas konsep hingga teori dari para ahli yang berkaitan dengan dengan objek penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka juga disusun untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat, sehingga mampu memberikan validitas terhadap jawaban penelitian yang dilakukan. Selain itu, bab ini juga akan disertai dengan sejumlah penelitian terdahulu yang akan diuraikan berdasarkan apa yang sama dan apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Di bagian akhir, kerangka pemikiran akan disertakan untuk menghadirkan alur logika berpikir yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional secara sederhana dapat disimpulkan sebagai tujuan atau 'misi' yang harus dicapai oleh sebuah negara. Dalam kepentingan nasional tersebut peran negara sebagai aktor pengambil keputusan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Hal ini didukung dengan pendapat seorang ahli, Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa negara merupakan 'pelindung' wilayah, penduduk, serta *way of life* yang otentik. Negara ini pula yang menjamin instrumen-instrumen keamanan, serta memajukan kesejahteraan masyarakatnya<sup>18</sup>.

Kepentingan nasional terbentuk dari apa yang menjadi kebutuhan suatu negara. Dan kebutuhan ini dipengaruhi oleh faktor internal yang ada di negara tersebut, seperti situasi politik-ekonomi, militer, serta kondisi sosial-budaya. Kepentingan nasional juga ditujukan untuk mencapai '*level of power*' tertentu yang ingin diciptakan negara

---

<sup>18</sup> Robert Jackson dan George Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

tersebut, agar dapat memberikan cukup dampak dan pengaruh secara global. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan instrumen dalam mengejar kekuasaan, demi memiliki kuasa atau kontrol terhadap negara lain. Selain itu Morgenthau juga menambahkan bahwa kepentingan nasional merupakan kemampuan negara untuk dapat melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya dari intervensi negara lain<sup>19</sup>. Dengan begitu, secara konseptual kepentingan nasional ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan perilaku politik luar negeri dari suatu negara<sup>20</sup>.

Perilaku politik tiap-tiap negara tentu beragam, dengan kapasitas negara yang berbeda pula. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor demografi, karakter, budaya, bahkan sejarah yang ada pada negara tersebut. Sehingga secara umum, kepentingan nasional dapat dipahami sebagai tujuan, cita-cita dan harapan yang ingin diraih oleh sebuah negara. Dalam pelaksanaannya, kepentingan nasional dapat diraih melalui kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral, tergantung dengan pada kebutuhan negara tersebut. Kerjasama yang terjalin dalam mencapai kepentingan nasional tersebut juga didasari oleh target jangka panjang atau jangka pendek yang ingin diraih. Selain itu, tolak ukur pemilihan partner kerjasama dalam upaya pencapaian kepentingan nasional juga bisa dipengaruhi oleh konteks kultural, seperti karakteristik masyarakat dan cara pandang bangsa.

Kepentingan nasional sendiri terbagi menjadi dua yakni yang bersifat vital dan juga yang bersifat non-vital. Kepentingan nasional bersifat vital mencakup hal-hal seperti kelangsungan hidup negara serta *core values* atau nilai-nilai inti yang menjadi identitas negara tersebut dalam menetapkan kebijakan luar negerinya. Disisi lain, kepentingan nasional yang bersifat non-vital tidak berhubungan dengan secara langsung dengan eksistensi negara tersebut, namun tetap diperjuangkan

---

<sup>19</sup> Hans J. Morgenthau. 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*

<sup>20</sup> P. Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

dalam kebijakan luar negeri<sup>21</sup>. Hal tersebut membuat kepentingan nasional yang bersifat vital menjadi mutlak diprioritaskan, sementara kepentingan nasional yang bersifat non-vital yang dampak dan fungsinya memerlukan waktu untuk dapat dirasakan.

Berdasarkan pada penjabaran diatas mengenai kepentingan nasional, peneliti ingin melihat bagaimana program IACS ini mampu berperan dalam upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional yang dimaksud termasuk memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan dan kedaulatan Indonesia, memperkuat hubungan kerjasama dengan pihak internasional dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang demokratis, pluralis, menjunjung tinggi HAM, dan aktif dalam perdamaian dunia.

### **2.1.2 Teori Diplomasi**

Dapat dikatakan bahwa diplomasi merupakan instrumen yang sangat penting dalam proses jalannya hubungan internasional sebuah negara, dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Diplomasi memungkinkan terjalinnya hubungan satu negara dengan negara atau organisasi internasional lainnya. Pada awalnya diplomasi memang hanya dikaitkan pada perundingan atau interaksi yang melibatkan aktor-aktor berupa negara-negara saja. Karena itu diplomasi dapat diartikan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan demi tercapainya tujuan politik luar negeri masing-masing negara pelaku diplomasi<sup>22</sup>. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan singkat bahwa diplomasi dan politik luar negeri merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan, didasari atas hubungan saling keterkaitannya. Hal ini dikarenakan bahwa politik luar negeri merupakan salah satu pokok dari kebijakan luar negeri suatu negara yang diberlakukan dalam mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional sebuah negara. Disisi lain

---

<sup>21</sup> Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu

<sup>22</sup> S.L Roy. 1995. Diplomasi. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada

diplomasi merupakan instrumen yang digunakan dalam merealisasikan kebijakan luar negeri itu sendiri.

Meski demikian, dalam hubungan internasional terdapat aktor-aktor lain yang bermain dan terlibat dalam proses diplomasi selain aktor yang berupa negara. Perkembangan teknologi digital, ekspansi pasar, hingga tataran politik dunia setelah era perang dingin telah merubah 'gameplay' dari hubungan internasional<sup>23</sup>. Pelaku diplomasi kini bukan saja dalam bentuk perwakilan sebuah negara saja. Perusahaan multi nasional (MNC), Organisasi pemerintah internasional (IGO), dan juga organisasi nonpemerintah internasional kini dapat juga mengambil tempat dan turut berperan dalam terjadinya sebuah proses diplomasi. Contoh aktor-aktor pelaku diplomasi selain negara yang dapat dengan mudah diidentifikasi adalah PBB, ASEAN, atau organisasi regional lainnya.

Asianto Sinambela juga memberikan penjelasannya mengenai apa itu diplomasi. Menurutnya diplomasi dapat dipahami sebagai mekanisme representasi, komunikasi, dan negosiasi, melalui negara-negara dan aktor internasional lainnya dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya<sup>24</sup>. Aktifitas negosiasi merupakan *core* atau inti yang menjadi esensi dari proses diplomasi. Secara umum, proses diplomasi dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan, kunjungan, maupun perjanjian-perjanjian internasional. Diplomasi sendiri selalu berorientasi pada kondisi *win-win solution* yang berarti saling menguntungkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses diplomasi tersebut. Melihat pentingnya fungsi dari diplomasi yang erat kaitannya dengan tercapainya kepentingan nasional sebuah negara, para pelaku diplomasi dituntut untuk memiliki kemampuan negosiasi yang baik, sehingga tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat diraih tanpa merugikan pihak manapun. Diplomasi juga dilakukan sebagai upaya menuju perdamaian dalam sebuah situasi konflik, dimana diplomasi memiliki peran sebagai manajemen konflik. Namun tidak hanya untuk mencapai

---

<sup>23</sup> Margono. Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional. Universitas Negeri Malang

<sup>24</sup> Asianto Sinambela. 2007. Penjelasan Umum Mengenai Blue Print, Arah, dan Strategi Diplomasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Jakarta: Proceeding Bank Indonesia

perdamaian, diplomasi juga dapat berfungsi sebagai pemeliharaan kondisi damai melalui persuasi terus menerus di tengah-tengah perubahan, terkait dengan fungsi yang juga dimiliki sebagai manajemen perubahan<sup>25</sup>.

Telah disinggung sebelumnya bahwa tujuan dari diplomasi pada umumnya adalah untuk mengedepankan kepentingan pribadi, dimana dalam konteks hubungan internasional, tercapainya kepentingan nasional merupakan tujuan akhir dari proses diplomasi. Dari sudut pandang Indonesia, maka tujuan dari segala bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pada akhirnya adalah menjaga keutuhan wilayah NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Namun tidak hanya itu, diplomasi juga mampu untuk mengakomodasi kepentingan lainnya, seperti ekonomi, perlindungan warga negara, pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga membentuk citra positif atau prestise di dunia internasional.

Apabila ditinjau dari skalanya dalam konteks hubungan internasional, diplomasi dapat dilakukan dalam skala bilateral atau multilateral<sup>26</sup>. Hal ini berkaitan dengan jumlah aktor negara yang terlibat dalam diplomasi tersebut, dimana diplomasi bilateral merupakan diplomasi yang melibatkan dua negara sebagai aktor utama. Disisi lain, diplomasi multilateral merujuk pada bentuk diplomasi yang melibatkan beberapa negara sekaligus dengan cakupan yang lebih luas dan dampak yang ditimbulkan pun lebih luas. Organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN, hingga berbagai bentuk kerjasama seperti G-20, OIC (Organisation of Islamic Cooperation) merupakan bentuk konkrit dari kerjasama multilateral tersebut.

---

<sup>25</sup> Adam Watson. 1984. *The Dialogues Between States*. London: Methuem

<sup>26</sup> Sukawarsini Djelantik. 2008. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu



Gambar 2.1 Wujud kerjasama antar negara ASEAN

Selain berdasarkan jumlah aktor yang terlibat, terdapat jenis diplomasi lain, seperti<sup>27</sup>:

- a. Diplomasi Boejuis-Sipil, merupakan diplomasi yang mengedepankan cara damai dengan tujuan saling menguntungkan
- b. Diplomasi demokratis, yakni proses diplomasi yang terbuka dan mempertimbangkan suara rakyat
- c. Diplomasi totaliter, peran negara ditingkatkan dalam bentuk diplomasi ini. Fasisme Italia, Spanyol dan nazi Jerman erat dengan diplomasi semacam ini.
- d. Diplomasi Preventif, dikeluarkan saat masyarakat berada ditengah situasi genting yang berpotensi konflik. Diplomasi ini secara umum bertujuan untuk menghindari pecahnya konflik
- e. Diplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan negara tertentu demi membentuk opini internasional terhadap sebuah negara
- f. Diplomasi Perjuangan, merupakan bentuk diplomasi untuk menghadapi situasi genting yang bertujuan untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak dan menghindari intervensi negara lain

<sup>27</sup> Mohammad Shoelhi. 2011. Diplomasi: Praktek Komunikasi Internasional. Bandung: Sembiosa Rekatama Media

- g. Multitrack diplomasi, merupakan bentuk diplomasi yang mengerahkan seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri
- h. Diplomasi publik atau *softpower diplomacy*, mengedepankan penyelesaian masalah melalui pesan damai.

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai diplomasi, maka diplomasi dapat dimaknai sebagai perpaduan antara ilmu dan seni dalam konteks perundingan, dalam usaha mencapai tujuan dan kepentingan negara dalam berbagai ruang lingkup. Tidak hanya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, namun juga di lingkup pertahanan, militer, dan segala yang menyangkut hubungan internasional.

### 2.1.3 Diplomasi Kebudayaan

Studi hubungan internasional merupakan studi yang terus berkembang, beriringan dengan dinamika kondisi internasional yang terus berubah. Hal ini pula yang menjadi dasar munculnya bentuk-bentuk diplomasi yang tidak disadari juga merupakan bentuk diplomasi. Ini terjadi karena mengingat wujudnya yang sangat berbeda apabila dikaitkan dengan diplomasi 'konvensional'. Diplomasi berbasis kebudayaan yang disebut sebagai diplomasi kebudayaan merupakan salah satunya. Diplomasi kebudayaan ini pada dasarnya bukanlah hal yang benar-benar baru, karena diplomasi kebudayaan telah beberapa kali disebutkan dalam berbagai literatur sebagai *Cultural Techniques in Foreign Policy*<sup>28</sup>.

Yang perlu diperhatikan dalam konsep ini adalah mengenai kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan dapat diartikan secara umum sebagai segala sesuatu hasil dan upaya budi daya manusia terhadap lingkungan<sup>29</sup>. Sementara itu Kuntjaraningrat memaknai kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia

<sup>28</sup> Charles O. Lerche Jr. & Abdul A. Said. 1964. *The Concept of International Politics*. New Jersey: Prentice

<sup>29</sup> J.W.M. Bakker S.J., 1984. *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia

dengan belajar<sup>30</sup>. Jadi, kebudayaan dalam konteks ini bukan sebatas hanya produk-produk seni budaya saja, namun lebih secara makro yakni segala hasil dari kehidupan dan tindak laku manusia merupakan kebudayaan.

Berangkat dari konsep diatas, maka definisi dari diplomasi kebudayaan sendiri dapat dinyatakan sebagai usaha sebuah negara untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan ini mencakup pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, kesenian, hingga propaganda<sup>31</sup>. Diplomasi kebudayaan bertujuan untuk membentuk opini publik internasional, sehingga dapat mendukung kebijakan politik luar negeri suatu negara tertentu. Hal ini memungkinkan diplomasi kebudayaan mampu mendukung usaha pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Dalam praktiknya sendiri, diplomasi kebudayaan dapat dijalankan melalui program pemerintahan, media elektronik, maupun cetak.

Seperti bentuk diplomasi pada umumnya, diplomasi kebudayaan ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan suatu negara melalui dimensi seperti ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lainnya dalam percaturan masyarakat internasional. Ada pun konsep-konsep diplomasi kebudayaan sebagai berikut<sup>32</sup>:

Apabila dilihat dari bentuknya, diplomasi kebudayaan dapat berupa:

- a. Eksibisi atau Pameran
- b. Propaganda
- c. Kompetisi
- d. Penetrasi
- e. Negosiasi
- f. Pertukaran ahli/studi
- g. Terorisme

---

<sup>30</sup> Kuntjaraningrat. 1979. Pengantar Antropologi Budaya. Jakarta: Aksara Baru

<sup>31</sup> K.J. Holsti. 1984. *International Politics, A Framework for Analysis Third Edition*. New Delhi: Prentice

<sup>32</sup> Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari. 2007. *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Ombak

Tabel 2.1 Hubungan Antara Situasi, Bentuk, Tujuan, dan Sarana Diplomasi Kebudayaan

Situasi	Bentuk	Tujuan	Sarana
DAMAI	-Eksibisi -Kompetisi -Pertukaran Misi -Negosiasi -Konferensi	-Pengakuan -Hegemoni -Persahabatan -Penyesuaian	-Pariwisata -Olahraga -Pendidikan -Perdagangan -Kesenian
KRISIS	-Propaganda -Pertukaran Misi -Negosiasi	-Persuasi -Penyesuaian -Pengakuan -Ancaman	-Politik -Media Masa -Diplomatik -Misi Tingkat Tinggi -Opini Publik
KONFLIK	-Teror -Penetrasi -Pertukaran Misi -Boikot -Negosiasi	-Ancaman -Subversi -Persuasi -Pengakuan	-Opini Publik -Perdagangan -Para Militer -Forum Resmi -Pihak Ketiga
PERANG	-Kompetisi -Teror -Penetrasi -Propaganda -Embargo -Boikot -Blokade	-Dominasi -Hegemoni -Ancaman -Subversi -Pengakuan -Penaklukan	-Militer -Para Militer -Penyelundupan -Opini publik -Perdagangan -Supply barang konsumtif (termasuk senjata)

Sumber: Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari. 2007.

Bila ditinjau dari tujuan akhirnya, diplomasi kebudayaan mencakup tujuan seperti pengakuan (*recognition*), penyesuaian (*adjustment*), bujukan (*persuasion*), ancaman (*coercion*), hegemoni, dan subversi. Sarana yang dapat digunakan dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan dapat melalui sarana infrastruktur seperti media elektronik dan media cetak, dan juga melalui sarana suprastruktur seperti pariwisata, para militer, pendidikan, kesenian, perdagangan, olahraga, dan opini publik. Diplomasi kebudayaan pun dapat dilaksanakan dalam situasi

damai, krisis, maupun perang<sup>33</sup>. Dalam penelitian ini, teori diplomasi kebudayaan digunakan mengingat didalam program *Indonesia Arts and Culture Scholarship* yang menjadi objek penelitian kali ini mencakup aspek seperti pendidikan, ilmu pengetahuan dan kesenian, yang nantinya akan dilihat bagaimana aspek tersebut mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian kepentingan nasional dan pertahanan nirmiliter negara.

#### 2.1.4 Konsep Ilmu Pertahanan

Ilmu pertahanan kini memang telah mengalami perluasan makna. Ilmu pertahanan kini bukan hanya mengenai “strategi” atau “ilmu militer” yang bukan saja mempelajari penggunaan angkatan bersenjata. Ilmu pertahanan juga bukan semata-mata mengenai taktik atau seni perang yang dimanfaatkan pada saat kondisi perang<sup>34</sup>. Memang hingga saat ini belum ada definisi secara universal yang mampu menjelaskan mengenai apa itu ilmu pertahanan. Namun, Supriyatno dalam bukunya mengutarakan definisinya mengenai ilmu pertahanan. Ilmu pertahanan menurutnya adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan sumber daya dan kekuatan nasional baik pada saat masa damai, perang, dan sesudah perang, dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri<sup>35</sup>. Ancaman yang dimaksud pun sifatnya luas, tidak hanya ancaman bersifat militer, namun juga ancaman yang bersifat nonmiliter yang mampu mengancam keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa.

Ilmu pertahanan ini juga akan dikaji nantinya, dan akan digunakan untuk membantu dalam perumusan kebijakan pertahanan yang nantinya akan menjadi strategi pertahanan suatu negara. Ilmu pertahanan sendiri memiliki kaitan dengan berbagai cabang ilmu, seperti filsafat, sejarah, geografi, politik, hukum, ekonomi, hingga antropologi. Antropologi sendiri merupakan ilmu yang membahas hal hal yang mengenai

---

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Makmur Supriyatno. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

<sup>35</sup> Ibid

kebudayaan, manusia, dan kesejarahan. Hal ini mencakup mempelajari hasil karya manusia, baik itu adat, kebiasaan, tata krama, dan struktur kemasyarakatan.

Manfaat dari ilmu antropologi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen, operasi militer, mengatasi upaya insurgensi, pembinaan teritorial, rekrutmen personil, hingga upaya kombat dalam membangun komponen pertahanan negara. Selain itu, ilmu antropologi juga dapat dimanfaatkan dalam menentukan gaya kepemimpinan yang dapat diimplementasikan dalam memimpin anggota yang memiliki keberagaman adat kebiasaan, tata krama, dan struktur kemasyarakatan serta kepercayaan dari salah satu personil<sup>36</sup>.

*Indonesia Arts and Culture Scholarship* merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri RI sejak tahun 2003 dan rutin diselenggarakan tiap tahunnya hingga saat ini. Program ini dikemas dalam bentuk beasiswa yang ditujukan untuk pemuda asing, yang berbasis pada nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu aspek nilai kemasyarakatan yang terkait dengan ilmu antropologi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pertahanan negara, sebagai salah satu unsur dalam ilmu pertahanan.

### **2.1.5 Konsep Diplomasi Pertahanan**

Diplomasi Pertahanan pada awalnya merupakan sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Departemen Pertahanan atau *Ministry of Defense* Inggris. Istilah ini pertama kali ditulis oleh kementerian pertahanan Inggris dalam *Strategic Defence Review* negaranya pada tahun 1998. Dalam tulisan tersebut dinyatakan bahwa diplomasi pertahanan melibatkan penggunaan senjata dalam mendukung upaya diplomasi dalam mencegah ataupun mengelola konflik. Diplomasi pertahanan juga disebutkan sebagai pendukung kegiatan kementerian

---

<sup>36</sup> Ibid hlm. 74

pertahanan demi menghilangkan musuh, membangun dan menjaga kepercayaan dalam membantu pengembangan angkatan senjata<sup>37</sup>.

Apabila dilihat dari apa yang disebutkan sebagai diplomasi pertahanan oleh kementerian pertahanan Inggris, bahwa diplomasi pertahanan erat kaitannya dengan kekuatan angkatan bersenjata, maka dapat diambil kesimpulan bahwa diplomasi pertahanan harus selalu berkaitan dengan aspek kekuatan militer. Namun seiring dengan berjalannya waktu, definisi mengenai diplomasi pertahanan pun ikut berkembang beriringan dengan kondisi tataran internasional yang dinamis. Diplomasi pertahanan dapat diartikan sebagai wujud diplomasi yang digunakan untuk meningkatkan kerjasama militer, mengurangi ketegangan yang terjadi antar negara, hingga menjaga aliansi dan membukan kesempatan untuk terwujudnya kerjasama atau latihan bersama<sup>38</sup>. Pedrason dalam disertasinya menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan kini mengalami perluasan makna, dan tidak lagi dapat disamakan dengan diplomasi militer. Diplomasi pertahanan merupakan segala metode serta strategi yang diterapkan oleh suatu negara dengan mengerahkan segala upaya di bidang ekonomi, budaya, kerjasama politik serta kerjasama pertahanan. Melalui dimensi-dimensi diplomasi tersebut diplomasi pertahanan diharapkan mampu merekatkan hubungan antar negara serta membangun kepercayaan (*mutual trust*) dan *confidence building measures* (CBM)<sup>39</sup>.

Selain itu diplomasi pertahanan juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan arus informasi dan meningkatkan lingkungan strategis akibat tingginya tingkat kepercayaan antar negara. Dapat dilihat bahwa definisi mengenai diplomasi pertahanan mengalami pergeseran dimana saat ini diplomasi pertahanan lebih mengedepankan pada bentuk

---

<sup>37</sup> International Affairs and Defence Section. 1998. *Strategic Defence Review White Paper*. United Kingdom: British Ministry of Defence

<sup>38</sup> Mulloy G. 2007. *Japan's Defense Diplomacy and "Cold Peace" in Asia*. Asia Journal of Global Studies

<sup>39</sup> Rodon Pedrason. "ASEAN's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community". Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg Institut Fur Politische Wissenschaft

kerjasama dalam rangka menjaga keamanan dan keutuhan negara, serta keselamatan bangsa.

Tabel 2.2 Kegiatan Diplomasi Pertahanan<sup>40</sup>

Diplomasi Pertahanan untuk CBM	Diplomasi Pertahanan untuk Peningkatan Kapabilitas Pertahanan	Diplomasi Pertahanan untuk Peningkatan Industri Pertahanan
1. Kunjungan kenegaraan 2. Dialog dan konsultasi 3. Saling tukar informasi strategis 4. Pembatasan kapabilitas pertahanan 5. Deklarasi kerjasama strategis 6. Pertukaran perwira 7. Pendidikan militer 8. Kesepakatan hubungan baik 9. Latihan militer bersama	1. Usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer 2. Pembelian alutsista, kredit ekspor 3. Pembangunan pangkalan militer 4. Pemberian <i>security umbrella</i> baik yang dilakukan oleh negara <i>core</i> ke negara <i>periphery</i> maupun sebaliknya	1. Kerjasama strategis antar negara dalam hal produksi senjata 2. Kerjasama strategis antar negara dalam pengembangan dan penelitian senjata 3. Pemberian lisensi 4. Investasi dalam industri pertahanan 5. Transfer teknologi

Sumber: Idil Syafwi (dalam Kustiari, 2018)

Di Indonesia sendiri konsep diplomasi pertahanan juga disebutkan bahwa dalam buku putih pertahanan tahun 2015. Disebutkan bahwa diplomasi pertahanan merupakan proses mengelola hubungan internasional antar negara dan instrumen kerjasama internasional, yang dapat menjadi sarana dalam tercapainya stabilitas kawasan. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Singh bahwa diplomasi pertahanan juga mencakup pada keinginan negara-negara yang semakin meningkat untuk melakukan kerjasama multilateral, dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan dan mencapai kepentingan nasional<sup>41</sup>. Makmur Supriyatno juga menambahkan bahwa diplomasi pertahanan menurutnya adalah bagaimana mencapai cita-cita sebuah negara atau kepentingan nasional

<sup>40</sup> Cindy Karina Kustiari. 2018. Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Hak Asasi Manusia Sebagai Penanggulangan Perdagangan Manusia (Studi Industri Perikanan Indonesia). Bogor: Universitas Pertahanan

<sup>41</sup> Bhubhinder Singh dan See Seng Tan. 2011. "Defense Diplomacy and Southeast Asia". Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies

melalui proses diplomasi atau kerjasama<sup>42</sup>. Penjelasan diatas semakin mempertegas bahwa memang terjadi perluasan makna mengenai diplomasi pertahanan, yang kini lebih menitikberatkan pada segala bentuk diplomasi dan kerjasama dalam rangka upaya pencapaian kepentingan nasional suatu negara.

Selanjutnya, disebutkan bahwa tujuan dari diplomasi pertahanan adalah untuk membangun CBM (*Confidence Building Measure*), meningkatkan kapabilitas militer, serta membangun industri pertahanan<sup>43</sup>. CBM sendiri dapat diartikan sebagai tingkat kepercayaan yang ada antar negara, transparansi antar negara, yang mendukung terjadinya proses kerjasama. Apabila hubungan antar negara yang terjadi didasari oleh rasa saling percaya dan harmonis, maka kemungkinan akan terjadinya konflik pun menjadi semakin kecil, sehingga bentuk ancaman pun dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Cottey dimana diplomasi pertahanan dapat berfungsi untuk meminimalisir terjadinya konflik yang mengancam pertahanan negara<sup>44</sup>. Hubungan saling percaya atau CBM tidak hanya berfungsi untuk meminimalisir terjadinya konflik. Namun, CBM juga akan membuka pintu-pintu kerjasama yang dapat terjadi antara Indonesia dengan negara lain dalam mendukung upaya pertahanan negara. Kerjasama yang dimaksud dapat berupa pertukaran pelajar, latihan personel militer bersama, hingga bentuk kerjasama pertahanan lainnya.

Dalam penelitian kali ini peneliti akan melihat korelasi konsep diplomasi pertahanan dalam program *Indonesia Arts and Culture Scholarship* oleh Kementerian Luar Negeri. Bentuk diplomasi kebudayaan yang diusung Kementerian Luar Negeri dalam program IACS inilah yang akan ditinjau dari aspek pertahanan melalui kaitannya dalam diplomasi pertahanan dan upaya dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

---

<sup>42</sup> Makmur Supriyatno. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

<sup>43</sup> Idil Syafwi. 2009. *Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*. Jakarta: Universitas Indonesia

<sup>44</sup> Andrew Cottey. 2004. *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxon: Routledge

### 2.1.6 Confidence Building Measure (CBM)

Proses diplomasi erat kaitannya dengan hubungan internasional antar negara. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa diplomasi dapat digunakan sebagai instrumen dalam upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara. Hal tersebut juga berlaku bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks Indonesia, CBM sendiri merupakan salah satu dari mekanisme kebijakan luar negeri dalam praktik diplomasi pertahanan Indonesia<sup>45</sup>. Indonesia dalam tiap aktifitas diplomasinya berorientasi pada peningkatan CBM dengan pihak negara lain, yang ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah negara dan juga meningkatkan pembangunan dalam negeri.

Signifikansi CBM terhadap kelangsungan sebuah negara memang tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan yang menyatakan bahwa CBM merupakan langkah yang tepat mengingat sifatnya yang fleksibel yang dapat dilakukan dalam skala unilateral, bilateral maupun multilateral, yang dapat mengurangi, mencegah *uncertainty* antar negara sehingga tidak memicu konflik bersenjata<sup>46</sup>. Apabila dilihat dari tujuan akhirnya, CBM sendiri memiliki tujuan akhir untuk membentuk rasa saling percaya sepenuhnya sehingga baik ketegangan maupun potensi ketegangan dapat diredam atau bahkan sepenuhnya dieliminir. Hubungan saling percaya ini sangat krusial posisinya, karena akan sangat berpengaruh pada persepsi negara-negara yang terlibat untuk tidak mengkonfrontasi satu sama lain, sehingga stabilitas baik secara regional maupun global akan tetap terjaga.

Dalam praktiknya, *Confidence Building Measure* melibatkan beberapa tingkatan aktor dan pranata internasional dimana pola yang terjadi meliputi:

- a. *People to people contact*
- b. *Non Government Organisation (NGO)*

---

<sup>45</sup> Evan A. Laksmana. 2012. *Regional Order by Other Means? Assessing the Rise of Defense Diplomacy in Southeast Asia*. Asian Security

<sup>46</sup> Brad Glosserman. 2005. *Cross-Strait Confidence Building Measures*. Honolulu: Issues & Insights

- c. Meningkatkan perdagangan dan kerjasama militer
- d. Pertukaran budaya<sup>47</sup>

Dalam penelitian kali ini, konteks *confidence building measures* digunakan untuk membangun rasa saling percaya dengan negara-negara asal peserta program IACS sehingga akan tercipta perspektif yang baik mengenai Indonesia. Perspektif yang baik diharapkan mampu meningkatkan potensi kerjasama yang terjalin, yang mampu bersinergi dalam mendukung pertahanan negara baik secara militer maupun nirmiliter.

## 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyertakan dan menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya ini digunakan peneliti sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian. Dalam menjabarkan beberapa penelitian terdahulu ini, peneliti akan mencoba membandingkan beberapa poin, seperti konteks penelitian, metode yang digunakan, serta hasil dari penelitian tersebut serta apa yang membedakan dengan penelitian ini.

- a. Penelitian terdahulu yang pertama adalah “Pelaksanaan *Confidence Building Measures* (CBMs) Pada Konflik Korea Selatan-Korea Utara Periode 2008-2011”. Penelitian ini merupakan tesis yang ditulis oleh Firstyarinda Valentina Indraswari dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 silam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan beberapa literatur sebagai salah satu sumbernya, Indraswari dalam kesempatan tersebut ingin melihat bagaimana pelaksanaan proses CBM dalam meredam konflik semenanjung Korea antara dua negara yakni Korea Utara dan Korea Selatan dalam rentang waktu 2008 hingga 2011.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik CBM yang terjadi terindikasi sebagai “inkonsisten” yang berujung pada peningkatan intensitas konflik kedua negara. *Inconsistency* yang

---

<sup>47</sup> Umbreen Javaid. 2010. *Confidence Building Measures in Nuclear South Asia: Limitations and Prospects*. Journal of South Asian Studies

dimaksud mencakup hingga intensitas komunikasi, bantuan dan pendampingan atau investasi, serta aspek sosial budaya yang kurang diperhatikan yang berujung pada eskalasi intensitas konflik kedua belah pihak. Indraswari dalam penelitian ini fokus terhadap aplikasi CBM dalam berbagai bidang seperti militer, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Peneliti menemukan beberapa korelasi antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indraswari dengan penelitian yang akan berjalan ini keduanya memfokuskan pada praktik CBMs. Hal ini akan membantu peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitiannya. Namun, yang membedakan adalah rentang waktu yang digunakan. Indraswari menggunakan periode waktu antara 2008 hingga 2011. Sementara, di dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan periode 2003-2017. Periode tersebut dipilih mengingat objek penelitian ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2003. Tentunya perbedaan waktu yang digunakan tersebut berdampak pada hasil temuan mengingat dinamika politik internasional yang selalu dinamis.

- b. Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Clarisa Gabriella, yang berjudul "Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia dalam Pencapaian Kepentingan Nasionalnya". Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang dalam aplikasi diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Indonesia dalam proses mencapai kepentingan nasionalnya. Sama seperti penelitian ini, Gabriella juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui studi literatur yang bersumber pada buku, jurnal, dokumen, serta *website* yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Gabriella menemukan bahwa diplomasi kebudayaan yang dilakukan Indonesia ini berarti bahwa secara sadar Indonesia

menanamkan, mengembangkan, dan memelihara citra Indonesia di luar negeri sebagai bangsa dan negara yang berkebudayaan tinggi. Selain itu, ditemukan bahwa praktik diplomasi kebudayaan ini memang merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Gabriella ini pada dasarnya sama-sama menekankan pada usaha pencapaian kepentingan nasional Indonesia melalui praktik diplomasi kebudayaan. Namun, poin yang membedakan adalah dalam penelitian ini tidak menyinggung pada penggunaan CBM sebagai hasil dari diplomasi kebudayaan tersebut. Dalam penelitian terdahulu tersebut, Gabriella hanya menyebutkan bahwa peran diplomasi kebudayaan hanya sebagai sarana promosi untuk menjelaskan realita kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Usaha pencapaian kepentingan nasional melalui diplomasi kebudayaan justru dirasa masih menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, penelitian kali ini akan melihat bagaimana wujud diplomasi kebudayaan mampu mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional melalui CBM yang dihasilkan.

- c. Penelitian terdahulu yang terakhir adalah penelitian yang berjudul “Diplomasi Soft Power Indonesia Melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan” yang dilakukan oleh Sartika Soesilowati dari Universitas Airlangga. Dalam penelitian tersebut, Soesilowati mengungkap seberapa jauh diplomasi *soft power* melalui pertukaran dan pengembangan pendidikan di luar negeri dalam memperkuat tujuan dan kepentingan nasional. Ditemukan bahwa terdapat hubungan langsung dan tidak langsung antara diplomasi pendidikan dengan kepentingan nasional. Melalui hasil penelitian ini, Soesilowati semakin mempertegas signifikansi dari bentuk baru diplomasi seperti ini. Bentuk baru diplomasi yang melibatkan berbagai aktor yang lebih inklusif dirasa semakin efektif dalam memperjuangkan kepentingan nasional di era tataran internasional di era sekarang.

Yang menjadi perbedaan pada penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah unsur utama yang menjadi objek penelitian. Soesilowati dalam penelitian ini menjadikan kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai pemrakarsa pelaksanaan proses diplomasi. Sementara, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menjadikan kementerian luar negeri sebagai pemrakarsa upaya diplomasi. Perbedaan kementerian ini dirasa akan membawa perbedaan pada praktik dan dampak diplomasi yang dihasilkan. Disamping itu, baik penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan ini mengedepankan praktik *people-to-people diplomacy*, yang merupakan bentuk diplomasi baru dimana pemerintah atau negara bukanlah pelaku utama dalam praktik diplomasi tersebut.

- d. Selanjutnya terdapat jurnal penelitian oleh Nur Jannah Siregar yang meneliti mengenai bagaimana Indonesia melakukan pendekatan dengan pemerintah Spanyol melalui aspek kebudayaan. Dalam jurnal penelitian yang berjudul "Diplomasi Kebudayaan Indonesia Terhadap Spanyol Melalui Kuliner Tahun 2012-2015" tersebut, Siregar menjelaskan bagaimana unsur kuliner Indonesia digunakan sebagai instrumen diplomasi. Menggunakan teori diplomasi kebudayaan dan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini juga dilakukan melalui proses studi literatur melalui buku, jurnal, dan data-data pendukung lainnya. Hasilnya diperoleh bahwa meningkatnya hubungan bilateral kedua negara, yang mempengaruhi beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi, dimana investasi Spanyol terhadap Indonesia semakin meningkat. Di sektor pariwisata, ditemukan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara asal Spanyol sebesar 9,56% pada periode Januari – Juni 2014. Peningkatan ini juga berkontribusi pada kekuatan ekonomi negara.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti pada kali ini akan mengambil sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian terdahulu tersebut memang ditujukan untuk melihat bagaimana diplomasi kebudayaan dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Yang membedakan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah fokus kepada bagaimana diplomasi kebudayaan dapat berkontribusi pada *image* positif Indonesia di mata internasional. Dari sisi pertahanan nirmiliter *image* atau citra positif tersebut diharapkan mampu meningkatkan CBM Indonesia, sehingga pintu-pintu kerjasama dan investasi asing akan semakin terbuka. Hal ini tentu akan berdampak pada aspek pertahanan Indonesia secara menyeluruh.

- e. Penelitian terdahulu terakhir yang menjadi salah satu referensi dalam penelitian kali ini adalah jurnal penelitian oleh Van Kim Hoang Ha dari Vietnam National University. Penelitian berjudul “Peran Diplomasi Budaya dalam Mewujudkan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN: Kasus Vietnam” ini menunjukkan bahwa diplomasi kebudayaan tidak hanya semata-mata untuk menerapkan, memberdayakan kebudayaan untuk memperbaiki perilaku diplomasi, namun lebih jauh lagi diplomasi kebudayaan juga meningkatkan posisi dan wibawa Vietnam di arena internasional. Selain itu, diplomasi kebudayaan juga mempererat hubungan antar negara dan dalam konteks ini membantu pembentukan *ASEAN Socio-Cultural Community* dan *ASEAN Community 2015*.

Penelitian terdahulu tersebut menjadi berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini, karena pada penelitian kali ini peneliti akan mencoba untuk melihat bagaimana diplomasi kebudayaan mampu berperan pada peningkatan CBM Indonesia dengan pihak internasional. Hal ini dilakukan demi melihat korelasi yang terjadi antara praktik diplomasi kebudayaan dalam mendukung pertahanan negara

Tabel 2.3 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
Pelaksanaan <i>Confidence Building Measures</i> (CBMs) Pada Konflik Korea Selatan-Korea Utara Periode 2008-2011	Firstyarinda Valentina Indraswari (2012)	Kualitatif, Studi Literatur	<i>Inconsistency</i> yang terjadi pada praktik CBM menyebabkan eskalasi konflik di semenanjung Korea	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah disinggunginya mengenai CBM sebagai poin penting dalam konteks pertahanan negara. Perbedaan terdapat pada periode waktu yang ditetapkan, berpengaruh pada hasil temuan mengingat kondisi politik internasional yang dinamis

<p>Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia dalam Pencapaian Kepentingan Nasionalnya</p>	<p>Clarisa Gabriella (2013)</p>	<p>Deskriptif, Kualitatif. Studi pustaka</p>	<p>Indonesia secara sadar membentuk citra bangsa melalui diplomasi kebudayaan. Praktik diplomasi kebudayaan ini memang merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia.</p>	<p>Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai upaya pencapaian kepentingan nasional. Namun, aspek pertahanan tidak disinggung. Tidak menyinggung CBM. Diplomasi kebudayaan hanya sebagai promosi realita</p>
<p>Diplomasi <i>Soft Power</i> Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Sartika Soesilowati (2015)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Terdapat hubungan langsung dan tidak langsung antara diplomasi pendidikan dengan kepentingan nasional. Signifikansi <i>new diplomacy</i> semakin dipertegas, dimana dirasa lebih efektif dibandingkan dengan diplomasi konvensional</p>	<p>Persamaan yang terjadi adalah penitik beratan pada <i>soft power</i>. Namun, aktor diplomasi yang menjadi objek penelitian berbeda yakni berasal dari dua kementerian yang berbeda, sehingga berimbang pada praktik dan dampak dari diplomasi yang dilakukan.</p>

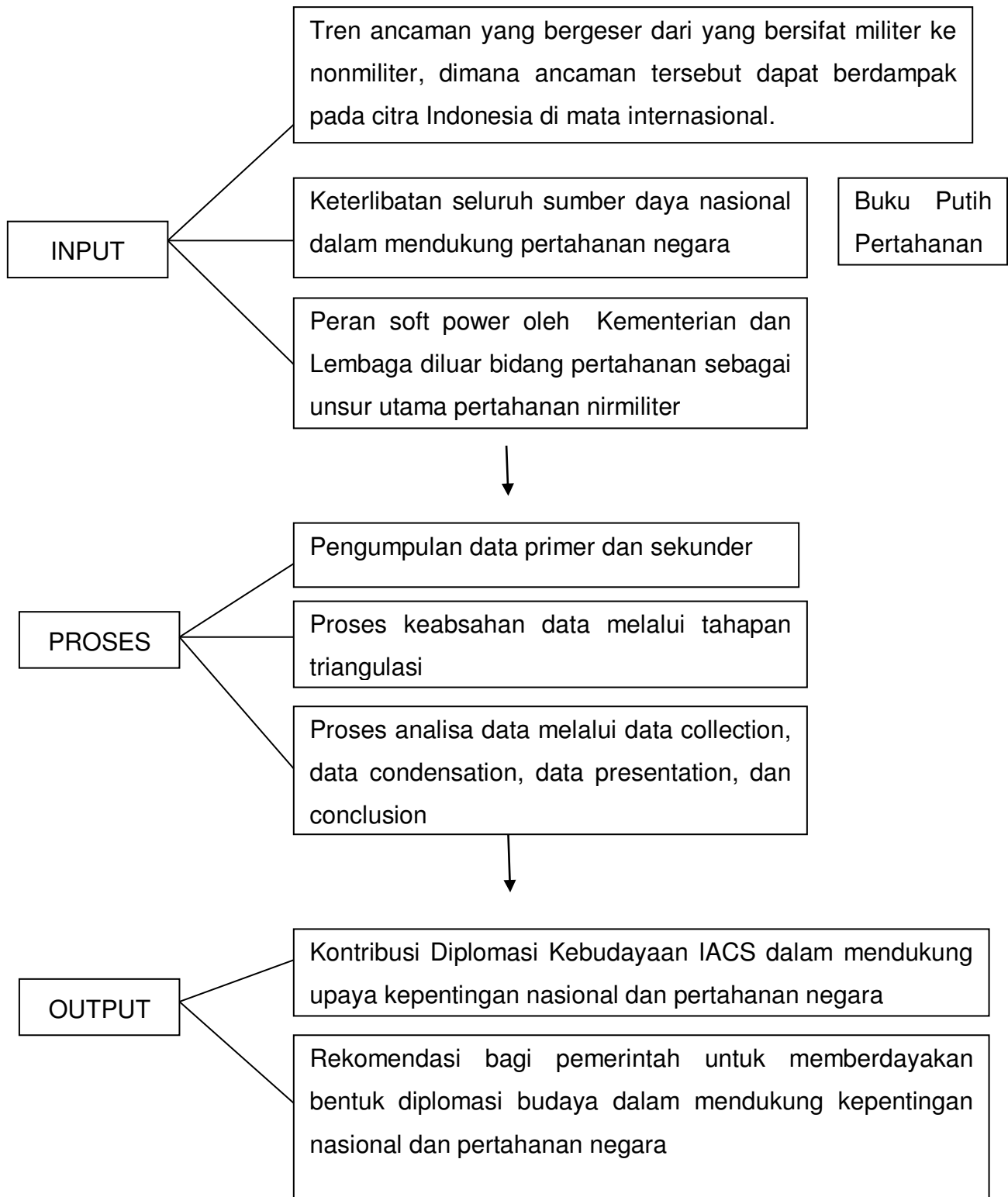
Diplomasi Kebudayaan Indonesia Terhadap Spanyol Melalui Kuliner Tahun 2012-2015	Nur Janah Siregar (2015)	Kualitatif, Studi Literatur	Diplomasi kebudayaan meningkatkan ekonomi negara dan hubungan bilateral kedua negara terkait.	Diplomasi kebudayaan sama-sama menjadi objek penelitian. Yang menjadi perbedaan adalah mengenai aspek pertahanan dan kepentingan nasional yang tidak disinggung lebih jauh. Hanya fokus pada bagaimana diplomasi kebudayaan dapat berkontribusi pada <i>image</i> positif Indonesia di mata internasional.
Peran Diplomasi Budaya dalam Mewujudkan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN: Kasus Vietnam”	Van Kim Hoang Ha (2016)	Kualitatif	Diplomasi kebudayaan tidak hanya untuk menerapkan, memberdayakan kebudayaan untuk memperbaiki perilaku diplomasi, namun lebih	Diplomasi Budaya menjadi hal yang menyamakan penelitian ini. Namun yang membedakan adalah perspektif pada diplomasi kebudayaan mampu berperan pada peningkatan

			<p>jauh lagi diplomasi kebudayaan juga meningkatkan posisi dan wibawa Vietnam di arena internasional. Selain itu, diplomasi kebudayaan juga mempererat hubungan antar negara dan dalam konteks ini membantu pembentukan <i>ASEAN Socio-Cultural Community</i> dan <i>ASEAN Community</i> 2015.</p>	<p>CBM Indonesia dengan pihak internasional. Hal ini dilakukan demi melihat korelasi yang terjadi antara praktik diplomasi kebudayaan dalam mendukung pertahanan negara.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: diolah Peneliti

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian kali ini, peneliti memulai dengan dasar pemikiran bahwa terdapat *shifting trend* pada bentuk ancaman dari yang bersifat militer ke ancaman yang bersifat nonmiliter. Ancaman-ancaman tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada citra Indonesia di mata internasional, yang tentunya berdampak pada upaya pencapaian kepentingan nasional dan pertahanan negara. Pemahaman peneliti mengenai keterlibatan seluruh sumber daya nasional sebagai unsur kekuatan pertahanan negara sebagaimana yang tertulis dalam buku putih pertahanan Kementerian Pertahanan mendasari keinginan peneliti untuk melihat peran yang diberikan Kementerian dan Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter. Dasar pemikiran tersebut dilanjutkan dengan proses pengumpulan data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara dan studi literatur. Setelah data yang diperlukan dirasa cukup, maka data tersebut diperiksa keabsahannya melalui tahapan triangulasi data. Dilanjutkan dengan menganalisa data melalui serangkaian proses termasuk *data condensation*, *data presentation*, dan *conclusion*. Sehingga diharapkan dari penelitian ini akan terjawab mengenai bagaimana IACS dapat berperan dalam upaya pencapaian kepentingan nasional dan mendukung pertahanan negara. Selain itu, rekomendasi untuk pemerintah agar memberdayakan diplomasi kebudayaan juga diharapkan dapat dihasilkan melalui penelitian ini. Untuk lebih ringkasnya, kerangka pemikiran akan digambarkan dalam Gambar 2.2



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

### BAB 3

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui program IACS, sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia mampu mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana sumbangsih yang diberikan program IACS dalam mendukung pertahanan negara. Dengan begitu, maka metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena metode kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek sosial<sup>48</sup>.

Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah ingin melihat bagaimana diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui program IACS, sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia mampu mendukung pertahanan negara. Diplomasi budaya erat kaitannya dengan aspek sosial, sehingga pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Selain itu metode kualitatif juga dipilih karena dalam metode penelitian kualitatif mengijinkan peneliti untuk melakukan proses interpretasi dari hasil yang sudah ditemukan<sup>49</sup>. Hal ini sesuai dengan proses interpretasi yang akan dilakukan peneliti saat data sudah sepenuhnya diperoleh, sehingga dihasilkan hasil penelitian yang lengkap.

---

<sup>48</sup> John Cresswell. 2014. *“Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches”*. California: Sage Publication

<sup>49</sup> Winston Jackson. 1995. *“Approaches to Methods”*. Scarborough: Prentice-Hall Canada

### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.1.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada salah satu program yang dinaungi langsung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, yakni IACS (*Indonesia Arts and Culture Scholarship*). Dengan begitu, proses penelitian dan pengambilan data akan dilakukan di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam struktur organisasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, tersusun atas beberapa direktorat yang secara spesifik menangani isu-isu regional tertentu. Dalam konteks ini, program IACS berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Dengan demikian, maka penelitian akan bertempat di kantor kementerian luar negeri Republik Indonesia dengan beberapa narasumber dari Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

Selain itu penelitian juga mengambil tempat di tempat-tempat lain dimana proses wawancara dengan para pakar dan praktisi terkait mengambil tempat. Wawancara dengan mantan menteri luar negeri Indonesia, Dr. Hassan Wirajuda dilakukan di gedung Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI. Selain itu, wawancara juga dilakukan di gedung LIPI Jakarta, bersama dengan Kepala Pusat Penelitian Politik, Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc.

#### **3.1.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dimulai dengan menentukan subyek dan obyek penelitian yang akan menentukan jalannya penelitian ini. Selanjutnya, pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data dan analisis data dilakukan pada bulan September 2018 hingga finalisasi dan pengujian pada Januari 2019.

### **3.2 Subyek dan Objek Penelitian**

#### **3.2.1 Subjek Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk melihat peran kementerian atau lembaga terkait dalam mendukung pertahanan nirmiliter negara. Dalam

konteks penelitian ini, Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian di luar bidang pertahanan yang secara konstitusi merupakan unsur utama dalam kekuatan pertahanan nirmiliter. Kementerian Luar Negeri merupakan garda terdepan dalam praktik diplomasi dan hubungan internasional, yang menghubungkan akses Indonesia dengan pihak internasional, dimana diplomasi seperti yang telah disinggung sebelumnya merupakan salah satu upaya pencapaian kepentingan dan tujuan nasional. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merupakan subjek penelitian dalam penelitian yang berjudul *Diplomasi Kebudayaan dalam Mendukung Kepentingan Nasional dan Pertahanan Negara: Studi Program Indonesia Arts and Culture Scholarship (IACS) oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia* kali ini.

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang kompeten pada isu-isu diplomasi dan hubungan internasional. Narasumber tersebut yakni:

- a. Arief Ilham Ramadhan, selaku Pejabat Fungsional Diplomat Muda Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- b. Dr. Nur Hassan Wirajuda, selaku praktisi hubungan internasional dan mantan menteri luar negeri RI periode 2001 – 2009
- c. Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc, selaku Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
- d. Halen Parti Warami, salah seorang peserta asal Indonesia pada penyelenggaraan program IACS 2018

### **3.2.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian kali ini adalah salah satu program yang diselenggarakan langsung dibawah naungan kementerian luar negeri republik Indonesia. Program yang dimaksud adalah *Indonesia Arts and Culture Scholarship (IACS)*. IACS sendiri merupakan bentuk diplomasi berbasis budaya yang telah diselenggarakan oleh kementerian luar negeri Republik Indonesia sejak tahun 2003, dan rutin dilaksanakan

tiap tahunnya hingga saat ini. Pada awalnya IACS sendiri hanya diperuntukan untuk negara anggota *South West Pacific Dialogue* (Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Timor-Leste dan Indonesia sebagai tuan rumah). Namun, seiring dengan signifikansi dan hal positif yang dihasilkan maka program beasiswa budaya ini terus berkembang sehingga pesertanya meluas hingga mencapai seluruh negara di dunia. Tercatat dari periode 2003 hingga 2018 program ini telah menghasilkan sebanyak 848 alumni yang berasal dari 74 negara di dunia. Program IACS inilah yang dirasa mampu membentuk CBM antara Indonesia dengan pihak luar, sehingga dapat memberikan kontribusi melalui terbukanya pintu-pintu kerjasama bagi Indonesia yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. serta mendukung pertahanan negara.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif kali ini peneliti akan mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi, serta studi literatur. Proses tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh valid dan semakin kuat. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dipilih karena merupakan direktorat yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program IACS. Selain beberapa narasumber dari Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik, beberapa narasumber lain juga menjadi sumber data. Narasumber tersebut termasuk mantan menteri luar negeri Republik Indonesia dan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, serta alumni dari program IACS dan budayawan yang terlibat sebagai pemateri dalam program tersebut. Wawancara ini dimaksudkan untuk membangun persepsi terhadap orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan

lainnya<sup>50</sup>. Wawancara dalam penelitian ini akan menghimpun informasi lisan maupun tulisan, melalui daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya maupun yang secara spontan muncul saat wawancara berlangsung.

Sementara itu, studi literatur berupa buku, jurnal, dan data valid terkait yang diperoleh melalui internet akan digunakan sebagai data sekunder sebagai pendukung data primer untuk memperkuat hasil akhir yang diperoleh. Teknik pengumpulan data lainnya yang dilakukan adalah observasi. Menurut Creswell, observasi adalah sebuah bentuk pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, dengan melakukan pengamatan yang mendetail terhadap manusia dan juga lingkungan sekitar<sup>51</sup>. Data-data yang diperoleh kemudian akan dicermati lebih lanjut, dianalisis secara kritis, sehingga dapat menjawab apa yang menjadi rumusan masalah.

### **3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data**

Data yang telah diperoleh akan kembali melewati proses validasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemeriksaan keabsahan data akan dilakukan melalui proses triangulasi. Teknik ini ditujukan untuk memperkuat validitas dan realibilitas atas data yang sudah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis akan dilaporkan secara detail, sehingga meningkatkan akurasi data yang digunakan dalam penelitian ini<sup>52</sup>

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis dalam pendekatan kualitatif lebih bersifat induktif, dimana analisis akan diarahkan dari sesuatu yang spesifik menjadi ke

---

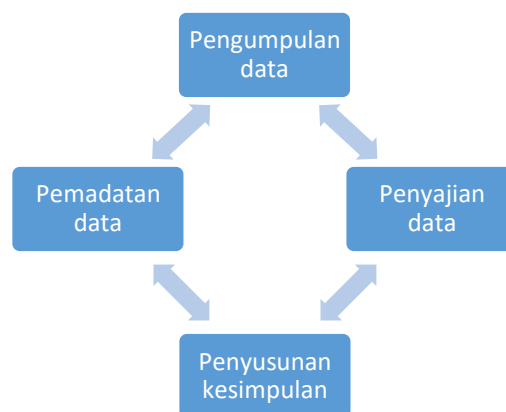
<sup>50</sup> Lexy J. Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

<sup>51</sup> John Creswell. 2014. "*Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*". California: Sage Publication

<sup>52</sup> Ibid

arah temuan yang lebih umum<sup>53</sup>. Data-data spesifik yang diperoleh melalui proses wawancara dan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya akan dianalisis menggunakan teori yang digunakan, sehingga tercipta kesimpulan atau temuan yang bersifat lebih umum.

Teknik analisis ini mencakup beberapa tahap seperti pengumpulan data (*data collection*), pemadatan data atau kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data presentation*), dan penyusunan kesimpulan (*conclusions*). Setelah seluruh data terkumpul, maka data yang diperoleh akan melewati proses kondensasi. Kondensasi disini dimaksudkan adalah memilah kembali data-data dengan tujuan data yang dihasilkan akan lebih terpusat dan ringkas, dan sehingga analisis akan tetap terfokus dan tidak melebar



Gambar 3.1 Alur analisis data

<sup>53</sup> Michael Huberman and Matthew Miles. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publication

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

Dalam Sub Bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari subjek penelitian terkait dengan penelitian yang dikerjakan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, sejumlah empat proses wawancara telah dilakukan. Keempat narasumber tersebut terdiri atas seorang pejabat fungsional Diplomat Muda dari Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, menteri luar negeri Republik Indonesia periode 2001-2009, dan seorang peserta program IACS (*Indonesia Arts and Culture Scholarship*).

##### 4.1.1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merupakan salah satu kementerian mutlak dari sekian banyak kementerian dalam susunan pemerintahan Indonesia. Kementerian Luar Negeri berfokus pada segala urusan yang meliputi urusan luar negeri atau dunia internasional, yang secara otomatis memposisikan kementerian ini sebagai garda terdepan dalam segala urusan yang bersifat internasional. Dengan kata lain, kementerian luar negeri merupakan jembatan utama yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain.

Kementerian Luar Negeri memiliki visi yakni "*terwujudnya wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim untuk kepentingan rakyat*". Terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam visi tersebut. **Terwujudnya wibawa diplomasi** merujuk pada terlaksananya penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan negara lain yang disegani dan dihormati oleh dunia internasional karena peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional. Yang kedua adalah **memperkuat jati diri bangsa** yang berarti penguatan

identitas/ciri khas yang menandai keberadaan bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain di dunia.

Selain itu, **negara maritim** berarti negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan mengelola wilayah lautnya untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan serta membangun konektivitas dan pertahanan maritim. Dan yang terakhir yakni mengutamakan **kepentingan rakyat**, dimana prioritas akan diletakkan pada pemenuhan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat guna membawa kemakmuran bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Pernyataan visi di atas menggambarkan komitmen yang diperjuangkan dan diwujudkan oleh Kementerian Luar Negeri, terutama melalui pelaksanaan tugas dan fungsi (*core competency*) sebagai institusi penyelenggara hubungan dan pelaksana politik luar negeri dengan tekad kinerja Kementerian Luar Negeri “Diplomasi untuk rakyat, diplomasi membumi.”, yang berarti manfaat dari kinerja diplomasi yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri harus dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat<sup>54</sup>.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Kementerian Luar Negeri beserta seluruh jajaran organisasi di dalamnya telah merumuskan tiga misi yang dilakukan selama kurun waktu 2015-2019. Misi tersebut antara lain:

- a. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerjasama internasional untuk memajukan kepentingan nasional.
- b. Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjurur pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif pemangku kepentingan nasional.
- c. Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang mumpuni.

---

<sup>54</sup> Kementerian Luar Negeri RI. 2015. Visi Kementerian Luar Negeri. [Online] <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/landasan-visi-misi-polugri/Pages/Visi-Kementerian-Luar-Negeri.aspx> Diakses pada 4 November 2018

Pada penelitian ini, objek utama yang diteliti adalah program IACS, dimana program tersebut dibawah langsung oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, khususnya Direktorat Diplomasi Publik. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 592 huruf c, Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, tugas Direktorat Diplomasi Publik adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik guna mendapatkan dukungan publik baik di dalam maupun luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik tersebut mencakup beberapa bidang seperti politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, serta isu aktual dan strategis<sup>55</sup>.

Direktorat Diplomasi Publik dalam Pasal 630 menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, serta isu aktual dan strategis.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia do luar negeri, serta isu aktual dan strategis.
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi,

---

<sup>55</sup> Kementerian Luar Negeri RI. 2015. Struktur Kementerian Luar Negeri. [Online] <https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/struktur-kemlu/Organization.aspx?kementerianID=6> Diakses pada 4 November 2018

- pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia do luar negeri, serta isu aktual dan strategis.
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia do luar negeri, serta isu aktual dan strategis.
  - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia do luar negeri, serta isu aktual dan strategis, dan pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

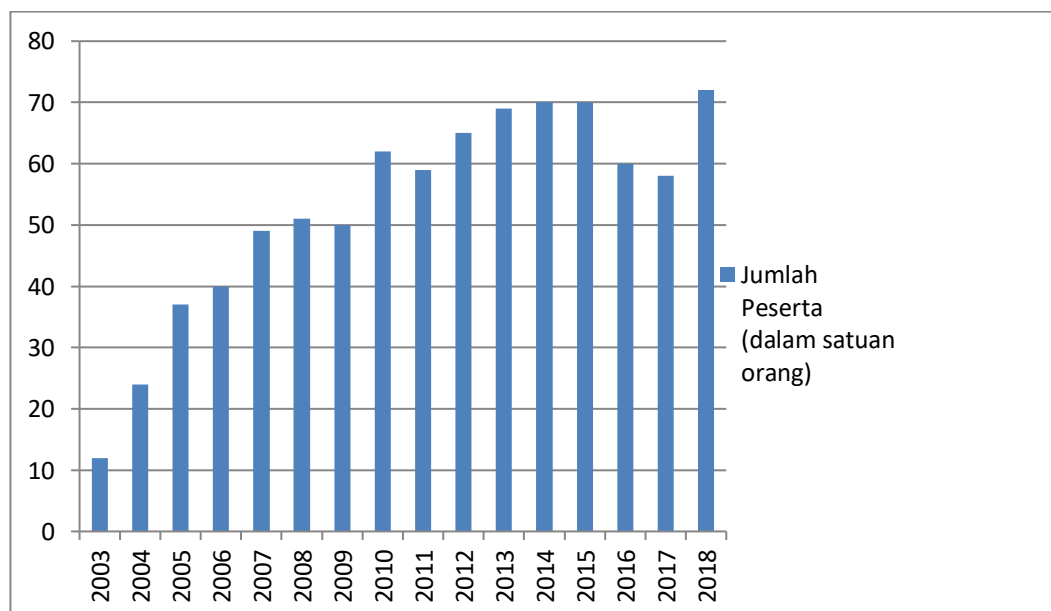
Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Diplomasi Publik memiliki tanggung jawab pada segala kegiatan berupa diplomasi publik yang tujuan akhirnya adalah demi mendapatkan dukungan publik baik di dalam maupun luar negeri. Dukungan publik memang memegang peranan yang signifikan dalam jalannya sebuah kebijakan, dimana dukungan publik akan berpengaruh pada kelancaran kebijakan yang ingin dijalankan. Dengan kata lain, segala kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional tentunya memerlukan dukungan penuh dari publik, agar tujuan akhir dari setiap negara yakni kepentingan nasional itu sendiri dapat tercapai. Disinilah IACS berperan sebagai diplomasi kebudayaan dan diplomasi publik, demi mendapatkan dukungan publik luar negeri maupun dalam negeri.

#### **4.1.2 IACS (*Indonesia Arts and Culture Scholarship*)**

Dikutip dari dokumen resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Indonesia Arts and Culture Scholarship*

merupakan *annual program* atau agenda tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2003, dan rutin dilaksanakan tiap tahunnya hingga saat ini. Pada awal penyelenggaraannya, program ini dikhususkan untuk negara-negara anggota *South West Pacific Dialogue* seperti Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste, dan tentu saja Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara. Pada proses wawancara dengan Arief Ilham Ramadhan, seorang pejabat fungsional diplomat muda dari Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, beliau membenarkan bahwa segala bentuk diplomasi, termasuk IACS ini dimaksudkan untuk *building the bridges* serta memperbaiki dan menjalin hubungan baik antar negara<sup>56</sup>.

Dilihat dari signifikansi dan keuntungan yang dihasilkan oleh program ini, Kementerian Luar Negeri pun memperluas cakupan negara peserta. Hal ini juga diimbangi dengan meningkatnya minat terhadap program ini, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah negara partisipan. Pada periode 2003 hingga 2018, program beasiswa ini telah diberikan kepada 848 orang yang berasal dari 74 negara di seluruh dunia.



Gambar 4.1 Grafik jumlah peserta IACS dari tahun ke tahun  
Sumber: Kementerian Luar Negeri RI

<sup>56</sup> Wawancara dengan Arief Ilham Ramadhan pada 4 Oktober 2018

Grafik tersebut menunjukkan jumlah peserta program yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan *concern* pemerintah Indonesia untuk terus mengekspansi diplomasi budaya melalui IACS ini. Selain itu, jumlah peserta yang meningkat juga mengindikasikan minat peserta asing yang baik dalam keikutsertaannya dengan program beasiswa IACS. Kementerian Luar Negeri akan bekerja sama dengan Konsulat Jenderal dan Kedutaan Besar Indonesia di beberapa negara di dunia untuk menyeleksi para peserta program beasiswa ini. Para peserta program ini dibatasi pada rentang usia dari 21 tahun hingga 27 tahun. Penyelenggaraan program beasiswa ini sudah mencakup hal sebagai berikut:

- a. Biaya pendidikan (termasuk kegiatan ekstrakurikuler)
- b. Transportasi pesawat pulang-pergi kelas ekonomi
- c. Akomodasi (transportasi dan penginapan)
- d. Asuransi kesehatan dengan jumlah terbatas. Setiap peserta disarankan memiliki asuransi kesehatan sendiri
- e. Uang saku selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 per bulannya

Secara teknis, dalam program ini para peserta akan tinggal di Indonesia selama kurang lebih 3 bulan di beberapa provinsi di Indonesia. Selama kegiatan berlangsung, para peserta akan tinggal di sanggar dan belajar mengenai kesenian dan budaya yang ada di Indonesia secara umum. Materi kesenian dan budaya yang diberikan tentunya berbeda, tergantung pada lokasi provinsi para peserta tersebut ditempatkan. Sebagai contoh, peserta yang ditempatkan di Jawa Timur akan diberikan materi seperti gamelan madura, proses pembuatan batik dan filosofinya, karawitan, hingga bahasa dan tarian tradisional Jawa Timur.

Sementara untuk di Bali, peserta akan diberikan materi terkait seni dan budaya khas Bali seperti tari pendet, kecak, maupun bahasa lokal setempat. Untuk tahun 2019, didapatkan data bahwa IACS akan diadakan di provinsi Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan DI Yogyakarta. Para peserta akan belajar dan mendalami kultur Indonesia yang beragam sesuai dengan provinsi-provinsi tersebut.

Selain itu, para peserta juga akan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah dan tujuan wisata.



Gambar 4.2 Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam rangkaian kegiatan program IACS

Program beasiswa ini diadakan untuk menunjukkan komitmen Indonesia, sebagai negara inisiator *South West Pacific Dialogue* dan salah satu negara pendiri ASEAN, dalam memperkuat kerjasama kawasan. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk membentuk pemahaman yang lebih baik (*better understanding*) terhadap Indonesia dari para peserta yang berasal dari negara-negara lain. Hal ini dapat dikaitkan sebagai salah satu wujud diplomasi publik maupun diplomasi budaya, yang bertujuan untuk membentuk suatu citra atau gambaran positif mengenai Indonesia. Program ini juga diharapkan mampu menanamkan *the culture of cooperation* yang ditimbulkan melalui kontak langsung antar peserta maupun dengan masyarakat setempat.

Dengan begitu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengharapkan terjalinnya dan terbinanya hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dengan negara-negara regional ASEAN dan negara-negara secara global. Hal ini tentu sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, salah satunya dalam mendukung pertahanan dan kedaulatan bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan.

## 4.2 Hasil Penelitian

Pada sub bab ini, hasil penelitian akan disajikan. Hasil penelitian tersebut berasal dari data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dengan para narasumber dari *stakeholder* terkait, serta pakar dan praktisi diplomasi dan hubungan internasional. Narasumber yang dimaksud terdiri atas Pejabat Fungsional Diplomat Muda Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Periode 2001 – 2009, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, dan salah seorang peserta dari program IACS itu sendiri. Disamping data primer, data sekunder yang didapatkan melalui proses studi literatur dan dokumen pendukung yang berhasil didapatkan juga dilibatkan demi mendukung analisis yang dibentuk.

Analisis yang akan dibentuk akan disesuaikan dengan aspek penelitian ini, yaitu: IACS (*Indonesia Arts and Culture Scholarship*) sebagai bentuk diplomasi kebudayaan Indonesia dalam mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional, serta bagaimana IACS ini dapat mendukung pertahanan negara.

### 4.2.1 Program IACS (*Indonesia Arts and Culture Scholarship*) dalam Mendukung Upaya pencapaian Kepentingan Nasional

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I kementerian negara, kementerian luar negeri bertugas untuk menjalankan fungsi<sup>57</sup>:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri

---

<sup>57</sup> Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I kementerian negara. Diakses dari <https://pjh.kemlu.go.id/files/Perpres%2024%20Tahun%202010.pdf> pada 9 November 2018

- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri, dan
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Berdasarkan peraturan presiden tersebut, dapat dikatakan bahwa program IACS sendiri merupakan wujud dari tugas kementerian luar negeri dalam menjalankan fungsi merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Perlu diingat bahwa salah satu kepentingan nasional Indonesia yang diamanahkan kepada Kementerian Luar Negeri adalah pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Kementerian Luar Negeri RI melalui program IACS ini merupakan cara dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Kementerian Luar Negeri memiliki visi yakni “*terwujudnya wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim untuk kepentingan rakyat*”. Dalam visi tersebut terdapat poin mengenai optimalisasi jati diri bangsa. Dimana tujuan dari memperkuat jati diri bangsa tidak lain ialah untuk memberikan identitas/ciri khas yang menandai keberadaan bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain di dunia. Jati diri bangsa juga dapat diartikan sebagai moralitas publik yang menjadi pegangan kehidupan tiap individu dalam sebuah bangsa<sup>58</sup>. Diketuskannya program beasiswa IACS ini merupakan bentuk dari diplomasi berbasis kebudayaan, yang kegiatannya termasuk eksibisi kebudayaan dan nilai-nilai kebangsaan, serta tradisi yang dimiliki Indonesia. Maka dari itu, program ini selaras dengan visi yang dimiliki Kementerian Luar Negeri, yakni dalam rangka memperkuat jati diri bangsa. Hal ini dimungkinkan karena IACS diharapkan menjadi media dalam memancarkan sistem nilai dan karakteristik bangsa Indonesia ke dunia internasional.

---

<sup>58</sup> Pidato Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Der. Soz Gumilar Rusliwa Somantri mengenai jati diri bangsa pada Seminar Etnopedagogik dan Pengembangan Budaya Sunda pada 23 September 2010

Selain itu, kementerian luar negeri merupakan salah satu kementerian yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, bersama dengan kementerian dalam negeri dan kementerian pertahanan. Ketiga kementerian tersebut disebutkan terkait dengan perannya sebagai kementerian-kementerian yang akan menjalankan jalannya pemerintahan di Indonesia apabila presiden dan wakil presiden dinyatakan mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan kepemimpinannya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kementerian luar negeri dengan segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan, termasuk IACS memiliki peran dan tujuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa saat ini era globalisasi telah menuntut seluruh masyarakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh semakin derasnya arus informasi, dimana masyarakat semakin mudah dalam memperoleh dan mengakses informasi yang diinginkan. Hal ini tentu terdengar sebagai hal yang positif. Namun, disamping itu globalisasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah tantangan yang harus direspon dengan cermat. Dalam konteks praktik hubungan internasional, globalisasi menyebabkan terjadinya *shifting* atau pergeseran dalam praktik diplomasi. Praktik diplomasi konvensional (*first track diplomacy*) yang melibatkan para diplomat, serta wakil-wakil pemerintahan kini perlahan mulai ditinjau kembali penggunaannya. Hal ini bukan berarti bahwa *first track diplomacy* sudah tidak efektif dan tidak layak lagi, melainkan adanya kesadaran bahwa praktik diplomasi juga harus disesuaikan dengan konteks yang ingin dicapai dan kondisi tataran global yang tengah terjadi. Hal ini pula lah yang memunculkan ide bahwa bentuk lain diplomasi seperti diplomasi publik, dapat menjadi alternatif dalam upaya pencapaian kepentingan suatu negara, hingga menyelesaikan dan mencegah konflik-konflik yang mungkin terjadi<sup>59</sup>.

Indonesia sendiri merupakan negara yang telah melakukan praktik diplomasi publik berbasis budaya dalam memperjuangkan kepentingan

---

<sup>59</sup> John McDonald. 1991. *Further Exploration of Track Two Diplomacy, Timing the De-Escalation of International Conflict*. Syracuse University Press: Syracuse

nasionalnya. Salah satu bentuk diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri adalah program IACS atau *Indonesia Arts and Culture Scholarship*. Mengutip dari hasil wawancara dengan mantan menteri luar negeri Indonesia, Dr. Hassan Wirajuda mengamini bahwa IACS memang merupakan bentuk *soft power* yang dilakukan pemerintah, bukan hanya untuk mencapai kepentingan nasional yang tercantum pada konstitusi. Tetapi juga kepentingan nasional yang lain, yakni untuk memancarkan sistem nilai yang dianut di Indonesia kepada dunia internasional<sup>60</sup>.

“...mengamankan kepentingan nasional, ada dua kepentingan nasional. Satu, kepentingan nasional yang diamanatkan oleh konstitusi. Ada 5, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Disitu berarti defense, diplomasi itu disitu. Kalau melindungi segenap bangsa, itu perlindungan warga. Lalu memajukan kesejahteraan umum, ekonomi. Mencerdaskan kehidupan bangsa, enlightened the life of our nation, pendidikan, budaya, disitu. Dan yang kelima ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan. Itu lima national interests yang permanen. Sepanjang negara republik Indonesia ini ada, sepanjang undang-undangnya 1945, itu permanen. Sampai kapanpun misi penyelenggaraan negara termasuk diplomasi ya melaksanakan itu. Disamping itu, kepentingan nasional yang lain yang tidak kalah penting yakni memproyeksikan memancarkan sistem nilai atau values system kita.”

Melalui pernyataan diatas, beliau beranggapan bahwa kepentingan nasional bukan hanya semata-mata apa yang tertuang dalam konstitusi. Lebih jauh lagi, memproyeksikan sistem nilai yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu kepentingan nasional yang harus dilakukan. Berawal dari pemikiran tersebut, Dr. Hassan Wirajuda selaku menteri luar negeri Indonesia yang sedang menjabat pada waktu itu akhirnya menggagas untuk dicetuskannya program IACS ini. IACS sendiri merupakan bentuk diplomasi kebudayaan dalam wujud beasiswa yang ditujukan khusus kepada para pemuda asing, dimana para peserta

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Dr. Hassan Wirajuda di Pusdiklat Kemenlu RI pada 9 Oktober 2018

tersebut nantinya akan disebar dan ditempatkan ke beberapa provinsi di Indonesia, untuk belajar dan berbaur dengan masyarakat setempat. Bukan hanya untuk belajar mengenai budaya 'fisik', namun juga cara pandang dan cara hidup serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat setempat. Hal ini ditujukan agar para peserta asing tersebut lebih mengenal Indonesia secara lebih mendalam, sehingga akan terbentuk *better understanding* dan perspektif positif terhadap Indonesia, serta menjalin hubungan baik dengan negara peserta. Hal itu diungkapkan dalam proses wawancara oleh Arief Ilham Ramadhan, seorang Pejabat Fungsional Diplomat Muda Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ia mengatakan,

“Segala bentuk diplomasi itu pasti ditujukan untuk memperbaiki hubungan, menjalin hubungan, *building the bridges*, atau membangun jembatan. Dalam hal ini, IACS termasuk dalam fungsi diplomasi tersebut. Lebih spesifiknya melalui *people to people contact*”<sup>61</sup>

Dalam program beasiswa IACS ini, para peserta akan disebar di beberapa provinsi di Indonesia dan menetap selama kurang lebih 3 bulan. Selama 3 bulan itu para peserta program tersebut akan diberikan pengajaran terkait dengan tradisi dan nilai-nilai budaya dan cara pandang masyarakat di Indonesia. Dalam pemberian materi tersebut, Kementerian Luar Negeri telah bekerjasama dengan beberapa sanggar dan Pemerintah Daerah di tempat dimana para peserta menetap. Materi yang diberikan kepada para peserta tersebut termasuk produk-produk kesenian dan budaya, seperti tarian, musik, dan produk-produk budaya lainnya. Menurut Halen Parti, seorang peserta IACS pada penyelenggaraan tahun 2018, ia mengungkapkan bahwa para peserta terlihat sangat antusias dalam setiap kegiatan pemberian materi. Ia menambahkan antusiasme tersebut dilanjutkan dengan niat para peserta untuk menyebarkan apa

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Arief Ilham Ramadhan di gedung Kementerian Luar Negeri RI pada 4 Oktober 2018

yang telah mereka dapat dari Indonesia saat mereka kembali ke negara masing-masing.

“Peserta dari luar negeri jelas sangat antusias dengan program IACS bahkan banyak dari mereka yang sangat antusiasnya mau benar-benar belajar budaya Indonesia dan ingin mengajarkannya di negara asal mereka, membuat suatu pertunjukan adapun yang sebelumnya sudah pernah belajar budaya Indonesia di KBRI setempat seperti tari pendet, gamelan, wayang dan ketika mengikuti program IACS mereka lebih memperdalam budaya Indonesia.”<sup>62</sup>

Tidak hanya budaya yang berupa ‘fisik’, namun juga cara pandang dan cara hidup masyarakat setempat. Hal ini diwujudkan dengan cara menjadikan rumah masyarakat, sanggar kebudayaan, dan juga *homestay* sebagai tempat tinggal para peserta selama mengikuti program ini. Hal ini dimaksudkan agar para peserta program IACS dapat secara optimal berbaur dengan masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan dengan harapan para peserta program IACS tersebut dapat secara langsung menjadi bagian dari *people to people contact*, yang menjadi salah satu inti dari diplomasi kebudayaan ini. Mereka akan menyelami cara hidup sehari-hari dan nilai-nilai kebangsaan yang dianut masyarakat Indonesia. Hal ini pula yang diharapkan oleh mantan menteri luar negeri Indonesia, Dr. Hassan Wirajuda. Ia meyakini bahwa dengan menjadikan rumah masyarakat, sanggar, dan *homestay* sebagai tempat tinggal mereka selama di Indonesia, maka mereka akan dapat secara penuh membenamkan (*immerse*) diri mereka hingga ke aspek tradisi adat dan juga filsafah yang menjadi nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan begitu, tujuan dari misi diplomasi kebudayaan ini akan lebih mudah tercapai, yakni membentuk citra positif Indonesia kepada dunia internasional, sehingga dapat mendukung pencapaian kepentingan nasional yang dicita-citakan Indonesia.

“....kita kirim mereka ke sanggar-sanggar budaya. Tapi tinggalnya tidak di hotel, tapi di komunitas. Sewa rumah, karena kita ingin mereka immerse, memahami jadi bukan hanya tampilan luar

---

<sup>62</sup> Wawancara via E-mail dengan Halen Parti, salah satu peserta program IACS 2018

tentang musiknya, tapi tradisi adat, dan juga filsafah. In short , bahwa dengan program IACS adalah satu, menyebar luaskan sistem nilai kita, ya dalam arti ya arts and culture. Dan memancarkan keluar. Yang kedua, to instill, melekatkan, in the mind of orang-orang muda diluar tentang Indonesia yang kaya dengan khasanah budayanya. Bukan Indonesia yang rusuh seperti apa yang ada di awal reformasi.”<sup>63</sup>



Gambar 4.3 Salah satu peserta program beasiswa IACS belajar membuat yang menjadi salah satu materi

Selain bertujuan untuk membangun citra positif Indonesia ke dunia internasional serta menjalin dan membina hubungan baik dengan negara-negara asal peserta program, program ini pun diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia di dalam diri tiap-tiap peserta. Untuk itu, program ini tidak hanya sebatas pada kegiatan belajar-mengajar saja. Kegiatan bertajuk *Indonesia Channel* diadakan sebagai penutup dari rangkaian program IACS ini. *Indonesia Channel* sendiri merupakan sebuah kegiatan penutup dimana seluruh peserta program beasiswa IACS akan menampilkan dan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan selama mereka tinggal di Indonesia. Dihadapan menteri luar negeri dan seluruh *stakeholder* terkait, para peserta tersebut akan menampilkan apa yang telah mereka dapatkan. Bisa dikatakan *Indonesia*

<sup>63</sup> Wawancara dengan Dr. Hassan Wirajuda di Pusdiklat Kemenlu RI pada 9 Oktober 2018

*Channel* sendiri merupakan bentuk apresiasi terhadap para peserta program beasiswa IACS tersebut.



Gambar 4.4 *Indonesia Channel* sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta program beasiswa IACS

Pada akhirnya para peserta inilah yang diharapkan akan menjadi *friends of Indonesia* yang mampu menjadi mitra kerja Indonesia, dan dapat bersuara untuk Indonesia apabila terjadi hal-hal atau *misconception* mengenai Indonesia. Pernyataan ini didukung oleh apa yang diutarakan oleh Arief Ilham Ramadhan,

“....kita ciptakan friends of Indonesia. Jadi alumni-alumni itu kita sebut sebagai friends of Indonesia, yang biasanya kalo ada acara di kedutaan selalu kita undang. Dan mereka diharapkan akan membantu kita menyebarkan berita-berita yang benar tentang Indonesia. Bukan berita-berita yang salah atau setidaknya mereka mengcounter kalau ada berita yang salah”

Aktifitas terkait dengan kebudayaan Indonesia yang dilakukan oleh para peserta IACS tidak berhenti pada masa penyelenggaraan program IACS saja. Pasca penyelenggaraan program IACS, para alumni IACS terus mempromosikan apa yang mereka dapatkan selama belajar di Indonesia. Sebagai contoh, Anastasia Pustylynk seorang peserta program IACS tahun 2017 asal Ukraina kini aktif mempromosikan tarian Bandhowo Taruno asal Yogyakarta di negaranya. Selain itu ada pula Ana Marin Lario asal Spanyol yang setelah selesai mengikuti program IACS, ia

memutuskan untuk memperdalam kajian antropologi budaya di Indonesia. Atau seperti yang dilakukan Brune Charvin peserta asal Perancis yang membuat film dokumenter mengenai tari Pakarena dari Makassar<sup>64</sup>.

Adanya fungsi diplomasi yang dibawa dalam program IACS inilah yang menjadi salah satu wujud *image* atau citra wajah Indonesia yang ingin ditampilkan di mata dunia. Dalam program inilah nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia diproyeksikan dan dipromosikan kepada para peserta program beasiswa IACS, yang diharapkan nantinya akan melekat dan terus dilanjutkan oleh para alumni program IACS di masing-masing negara. Dengan kata lain, nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai opini publik bagi Indonesia ke dunia internasional, bahwa Indonesia adalah negara yang sarat akan nilai-nilai budaya, dan sarat dengan perdamaian di tengah keragaman yang dimiliki. Opini publik semacam ini lah yang akan menjadi bentuk dukungan dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia yang dicita-citakan.

#### **4.2.2 Kontribusi Diplomasi Kebudayaan melalui IACS dalam Mendukung Pertahanan Negara**

Dapat dipastikan bahwa setiap negara mengharapkan terjalinnya hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain. Negara berkembang seperti Indonesia tentunya masih perlu mengandalkan jalinan hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain, sehingga memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kerjasama yang mampu mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional dalam rangka pertahanan negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi dunia hubungan internasional yang senantiasa dinamis dapat berdampak pada interaksi antar negara yang fluktuatif. Disinilah peran IACS diharapkan mampu merespon tantangan pertahanan tersebut. IACS sebagai bentuk *soft power* dapat disinergikan dengan *hard power*, sehingga membentuk *smart power* dalam mendukung pertahanan negara<sup>65</sup>. Prinsip *smart power* dapat diartikan sebagai sebuah strategi yang terintegrasi, berbasis pada

---

<sup>64</sup> Data oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI

<sup>65</sup> Wawancara dengan Dr. Hassan Wirajuda

sumberdaya, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. *Smart power* juga dapat diartikan sebagai *smart use of power*, yang berarti kemampuan untuk mengelola dan menggunakan potensi *power* sesuai dengan keadaan dan tujuan yang diinginkan<sup>66</sup>

Didapatkan bahwa aktifitas IACS yang berdasarkan pada *people to people contact* tersebut dapat berkontribusi pada pertahanan negara. Kontribusi tersebut dihasilkan melalui terciptanya CBM antara Indonesia dengan negara-negara asal peserta program IACS. CBM atau *Confidence Building Measures* sendiri dapat dikatakan sebagai upaya-upaya yang dilakukan baik pada tingkat unilateral, bilateral, hingga multilateral yang pada akhirnya diharapkan memiliki kapabilitas dalam mengurangi, mencegah tingkat ketidakpastian, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya konflik diantara pihak-pihak yang bertikai<sup>67</sup>. Mengingat tingkat CBM yang berada pada taraf bilateral maupun multilateral, maka Kementerian Luar Negeri RI pun turut berperan dalam praktik CBM tersebut. Selain melalui IACS, Kementerian Luar Negeri RI juga berkontribusi pada penguatan CBM melalui tergabungnya Indonesia dalam *Conference on Interaction and Confidence Building* atau CICA<sup>68</sup>. CICA sendiri merupakan forum antar pemerintah yang dibentuk pada tahun 2002, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama, menciptakan dan menjaga situasi damai, *confidence*, dan persahabatan di benua Asia demi mendorong keamanan di kawasan.

CBM sendiri dapat tercipta bukan hanya melalui forum-forum internasional, aktifitas *people to people contact* juga mampu membantu proses terciptanya CBM. IACS sebagai bentuk diplomasi kebudayaan yang memiliki *core* pada aktifitas *people to people contact*, sehingga mampu menjaga dan membangun CBM Indonesia dengan pihak internasional. Interaksi secara langsung yang terjadi diantara para peserta beasiswa IACS dengan masyarakat Indonesia setempat akan

---

<sup>66</sup> I Gde Armyn Gita. 2012. *Analisis Smart Power dalam Strategi Militer Amerika Serikat Melawan Al-Qaeda (2009-2012)*. Jakarta: Universitas Indonesia

<sup>67</sup> Brad Glosserman. 2005. *Cross-Strait Confidence Building Measures*. *Journal of Issues & Insights*. Honolulu

<sup>68</sup> *Buku Diplomasi Indonesia 2014*. 2014. Kementerian Luar Negeri RI

menciptakan kesepahaman dan saling pengertian diantara mereka. Hal ini juga didukung oleh pihak Kementerian Luar Negeri RI, dimana salah satu narasumber menyatakan:

“.....ada alumni dari Belanda. Dia mendirikan organisasi pemuda Indonesia-Belanda. Namanya Netherland-Indonesia Youth Society, di Belanda didirikan. Itu mungkin ya kalo dianalisa juga itu bagian dari Confidence Building Measure. Dan dia aktif pada lobi lobi juga, jadi organisasi itu memainkan peran kelompok penekan. Kalau belajar ilmu sosiologi ada yang namanya kelompok penekan atau organisasi sosial yang aktif melakukan advokasi, atau lobi-lobi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan mereka memainkan peran itu. Sebagai bridge builder, mereka menyatukan dua anak-anak muda dari dua negara itu di Indonesia-Netherland Youth Society<sup>69</sup>”

Mantan menteri luar negeri Indonesia, Dr. Hassan Wirajuda menambahkan bahwa IACS merupakan salah satu wujud penghargaan terhadap budaya. Beliau mengatakan bahwa penghargaan terhadap budaya bisa menjadi *positive factor* yang mewujudkan apresiasi positif terhadap suatu negara. Jalur *people to people* yang terjalin dalam kegiatan IACS ini akan memperkuat pemahaman masyarakat asing terhadap Indonesia, yang pada akhirnya melalui dasar kesepahaman tersebut akan memperkuat CBM yang dimiliki Indonesia kepada dunia internasional. Hal senada juga diutarakan oleh Adriana Elisabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ditinjau dari konteks hubungan internasional, diplomasi kebudayaan melalui IACS ini patut diperhitungkan. Memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi asing, mendatangkan mereka ke Indonesia dan tinggal langsung bersama masyarakat lokal untuk memahami bagaimana Indonesia sebenarnya merupakan bentuk tindakan yang positif. Ini mengindikasikan transparansi yang ingin ditunjukkan oleh Indonesia terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki. Namun, beliau menambahkan bahwa diperlukan adanya kontinuitas atau keberlanjutan.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Arief Ilham Ramadhan, Pejabat Fungsional Diplomat Muda Kementerian Luar Negeri RI pada 4 Oktober 2018

Hal ini dikarenakan karena *trust* atau kepercayaan merupakan hal yang diperoleh melalui proses, bukan secara instan<sup>70</sup>.

IACS memungkinkan terjadinya proses *learning and sharing experience* secara dua arah. Maksudnya, bukan hanya para peserta program yang dapat belajar memahami budaya di Indonesia. Namun, mereka juga dapat memperkenalkan nilai-nilai yang ada pada negara asal mereka kepada masyarakat setempat. Proses *learning and sharing* seperti ini yang akan melahirkan pemahaman yang lebih baik atau *better understanding* pada pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut dapat menghindarkan Indonesia dari ketegangan politik, terutama yang berbasis pada sentimen budaya yang dapat menjadi isu untuk keamanan internasional. Perlu diketahui bahwa dimensi keamanan pun mengalami pergeseran, dari konsep keamanan tradisional menuju non-tradisional. Tercatat pada tahun 1994 dari 23 perang yang terjadi di dunia, 18 diantaranya diakibatkan oleh sentimen-sentimen budaya, agama, dan etnis<sup>71</sup>. Tentunya hal itu merupakan suatu yang ingin dihindari oleh pemerintah Indonesia, dan IACS pun dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk menghindari sentimen-sentimen tersebut.

Hal ini memungkinkan terjadi karena IACS memiliki muatan budaya dan tradisi nasional. Ken Booth melihat adanya relasi nilai tradisional suatu negara sebagai upaya penyelesaian masalah dan keamanan. Ia menyebutnya sebagai *strategic culture*, dimana menurutnya *strategic culture* adalah tradisi nasional, nilai-nilai, cara bertingkah laku, kebiasaan, dan beberapa cara adaptasi terhadap lingkungan dan penyelesaian masalah sehubungan dengan ancaman atau menggunakan kekuatan. Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Dewi Fortuna Anwar, dimana ia menyatakan bahwa kultur strategis digunakan dalam upaya pembangunan negara yang berfungsi untuk memperkokoh arah

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Adriana Elisabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI pada 12 November 2018

<sup>71</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

perkembangan budaya politik serta organisasi pertahanan negara<sup>72</sup>. Anwar menambahkan yang menjadi sumber dari *strategic culture* yakni (1) faktor geografis, populasi dan sumber daya alam, (2) Latar belakang sejarah nasional, (3) Struktur politik dan organisasi pertahanan. Namun, ketiga hal tersebut tentu berbeda di tiap negara.

Di Indonesia sendiri, *strategic culture* didasarkan pada tiga hal fundamental. Yang pertama adalah pengalaman masa lampau yang membentuk sebuah kesatuan identitas ditengah-tengah keberagaman masyarakatnya. Yang kedua adalah perjuangan memperoleh kemerdekaan yang terjadi di Indonesia pada masa lalu, dimana pada konteks ini kekuatan militer memainkan peran inti. Dan yang terakhir adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif<sup>73</sup>. *Strategic culture* tersebut yang membenarkan bahwa budaya dan nilai-nilai tradisi nasional memiliki kaitan dengan pertahanan negara. Pada konteks IACS, hal tersebut sedikit atau banyak juga berkontribusi pada peningkatan CBM yang dimiliki Indonesia, yang diakibatkan oleh meningkatnya hubungan saling memahami. Agenda kegiatan IACS yang dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia secara tidak langsung mengekspos keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia, dan tiap-tiap budaya tersebut memiliki ciri khasnya sendiri. Hal ini lah yang harus dimanfaatkan Indonesia untuk dapat memiliki pengaruh yang besar di dunia internasional melalui program IACS ini.

### 4.3 Pembahasan

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian dipresentasikan, pertanyaan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya akan dibahas dan dijawab. Pertanyaan penelitian akan dibahas dan dijawab dengan menghubungkan hasil penelitian dan data yang telah diperoleh, dengan beberapa teori dan konsep yang mendukung. Peneliti membagi sub bab ini menjadi dua bagian. Pertama, pembahasan mengenai bagaimana

---

<sup>72</sup> Dewi Fortuna Anwar. 1996. *Introduction*, dalam *Indonesia's Strategic Culture: Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara dan Hankamrata*. Australia-Asia Papers

<sup>73</sup> Yohanes Sulaiman. 2016. *Indonesia's Strategic Culture: The Legacy of Independence*. Journal of Strategic Asia

program beasiswa IACS dalam mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional. Dilanjutkan dengan pembahasan terkait kontribusi yang diberikan IACS sebagai wujud diplomasi kebudayaan terhadap pertahanan negara.

#### **4.3.1 Program IACS (*Indonesia Arts and Culture Scholarship*) dalam Mendukung Upaya Pencapaian Kepentingan Nasional**

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memiliki peran penuh dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Menjaga eksistensi dan kedaulatan negara, dalam hal ini adalah pengakuan pihak internasional atas kedaulatan Indonesia merupakan prioritas utama. Selain itu, menjalankan politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, dan turut berperan dalam menjaga perdamaian dunia tak luput menjadi tugas Kementerian Luar Negeri Indonesia. Salah satu wujud nyata kementerian luar negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut ialah pada program IACS. Program tahunan yang menginjak tahun ke 15 pada tahun 2018 ini merupakan bentuk diplomasi kebudayaan yang berfungsi untuk membina dan membangun hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara lain. Selain itu, IACS juga diadakan sebagai bentuk diplomasi kebudayaan yang bertujuan untuk membentuk citra positif Indonesia yang nantinya akan dipancarkan ke dunia internasional melalui para peserta program tersebut.

Menurut mantan menteri luar negeri Indonesia, Dr. Hassan Wirajuda, usia 15 tahun menunjukkan bahwa program ini telah melewati *critical test* dan menunjukkan bahwa memiliki *sustainability* yang dimiliki program ini tidak main-main<sup>74</sup>. Dengan kata lain, program ini memiliki dampak dan signifikansi yang jelas terhadap kepentingan negara, sehingga terus dipertahankan keberadaannya. IACS atau *Indonesia Arts and Culture Scholarship* sendiri merupakan bentuk dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Dr. Hassan Wirajuda pada 9 Oktober 2018

Negeri. Diplomasi sendiri pada awalnya hanya diartikan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan demi mencapai tujuan politik luar negeri masing-masing negara pelaku diplomasi<sup>75</sup>. Pada awalnya diplomasi pun masih dianggap sebagai hal yang konvensional, dimana diplomasi erat kaitannya dengan perundingan para pemerintah negara-negara. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, teknologi, dan tataran politik dunia, praktik diplomasi pun ikut berubah dari segi bentuk dan juga pelaku yang terlibat. Praktik diplomasi kini dapat berupa pertemuan, kunjungan, hingga pertukaran pelajar. Selain itu, diplomasi juga dianggap sebagai upaya manajemen konflik, baik untuk meredam konflik maupun untuk memelihara situasi damai<sup>76</sup>.

IACS merupakan program beasiswa yang diberikan kepada pemuda asing, dengan mendatangkan mereka untuk belajar dan mengenal Indonesia melalui aspek kebudayaan dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hal ini juga ditujukan untuk memelihara hubungan baik Indonesia dengan negara asal peserta, serta meminimalisir terjadinya konflik. Selain itu, berdasarkan pada kebijakan pertahanan negara tahun 2018 oleh Kementerian Pertahanan, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial menjadi salah satu agenda prioritas pertahanan<sup>77</sup>. Restorasi sosial sendiri apabila mengacu pada Kementerian Sosial dapat diartikan sebagai upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat, yang mengalami kondisi mudurnya nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa, sehingga dapat kembali ke kondisi idealnya. Konten dari IACS yang mengangkat nilai-nilai asli kebudayaan bangsa Indonesia dirasa akan mendukung upaya restorasi sosial tersebut. Dengan mengangkat dan terus melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia, diharapkan IACS mampu menjaga dan

---

<sup>75</sup> S.L Roy. 1995. Diplomasi. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada

<sup>76</sup> Adam Watson. 1984. *The Dialogues Between States*. London: Methuem

<sup>77</sup> Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018. 2018. Kementerian Pertahanan [Online] <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/02/LAMPIRAN-JAKHANNEG-2018-FINAL.pdf> Diakses pada 1 Januari 2019

mengingatkan masyarakat Indonesia akan jati diri bangsa Indonesia, dan terus memegang teguh nilai-nilai luhur kebangsaan.

Lebih lanjutnya, IACS sendiri dapat dikatakan mendukung tujuan dan sifat politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia, yakni politik bebas-aktif. IACS memfasilitasi untuk terjalinnya relasi antar masyarakat di dunia agar dapat saling memahami dan hidup dalam damai, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang aktif dalam perwujudan perdamaian dunia. Turut berperan aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dunia merupakan salah satu dari kepentingan nasional Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa IACS mampu mendukung kepentingan politik luar negeri Indonesia dan dalam upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

IACS sendiri merupakan wujud dari diplomasi kebudayaan yang dijalankan Kementerian Luar Negeri RI dalam mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia. Diplomasi kebudayaan ini pada dasarnya bukanlah hal yang benar-benar baru, karena diplomasi kebudayaan telah beberapa kali disebutkan dalam berbagai literatur sebagai *Cultural Techniques in Foreign Policy*<sup>78</sup>. Jika ditelaah dari definisinya, diplomasi kebudayaan sendiri dapat dinyatakan sebagai usaha sebuah negara untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan ini mencakup pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, kesenian, hingga propaganda<sup>79</sup>. Tidak hanya itu, dimensi lain seperti ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lainnya dalam percaturan masyarakat internasional juga menjadi unsur dalam diplomasi kebudayaan. Sementara itu program IACS sendiri terdiri atas pemberian materi terkait seni musik, tarian, hingga nilai-nilai filosofis yang tertanam dalam masyarakat di Indonesia. Aktifitas dalam program IACS yang memiliki *core* pada peran *people to people* sejalan dengan inti dari diplomasi kebudayaan itu sendiri.

---

<sup>78</sup> Charles O. Lerche Jr. & Abdul A. Said. 1964. *The Concept of International Politics*. New Jersey: Prentice

<sup>79</sup> K.J. Holsti. 1984. *International Politics, A Framework for Analysis Third Edition*. New Delhi: Prentice

Para peserta program IACS yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia diharapkan akan memahami nilai-nilai dan ideologi yang dianut di Indonesia. Kemajemukan yang dimiliki masyarakat Indonesia namun disisi lain masih mampu bergandengan tangan dalam perdamaian, diharapkan menjadi cerminan masyarakat Indonesia yang ditampilkan di dunia internasional. Hal ini selaras dengan diplomasi kebudayaan yang bertujuan untuk membentuk opini publik internasional, sehingga dapat mendukung kebijakan politik luar negeri suatu negara tertentu.

IACS sebagai salah satu bentuk diplomasi kebudayaan memiliki peran dalam upaya pencapaian kepentingan nasional. Berbicara mengenai kepentingan nasional, usaha-usaha untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara terhadap dunia internasional tentu merupakan poin yang tidak dapat dilepaskan. Hal tersebut dapat diraih dengan membentuk citra positif yang baik mengenai Indonesia, yang nantinya akan membentuk opini publik yang baik pula terhadap Indonesia. Kegiatan seperti ini bisa disebut sebagai *Nation Branding*<sup>80</sup>. Melalui IACS, pemerintah ingin mencerminkan Indonesia sebagai negara yang aman, damai, demokratis dengan keberagaman masyarakat dan kekayaan budaya yang dimiliki. Dengan begitu, maka IACS merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk menggalakan *soft power* untuk memikat pihak internasional dengan membangun citra positif Indonesia, demi melancarkan kepentingan nasionalnya.

Hal ini memungkinkan bila dikaitkan dengan apa yang disebutkan oleh Joseph Nye, dimana ia mengatakan bahwa *soft power* sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments*”.<sup>81</sup> Menurut Nye *soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus dengan cara paksaan atau imbalan namun melalui *attraction*. Nilai-nilai kesenian dan budaya yang ditampilkan pada program IACS inilah yang dijadikan sebagai *point of*

---

<sup>80</sup> Tonny Dian Efendi. 2011. *Diplomasi Publik Jepang: Perkembangan dan Tantangan*. Bogor: Ghalia Indonesia

<sup>81</sup> Joseph S. Nye. Jr. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. Public Affairs: New York.

*attraction* dari *soft power* tersebut. Dalam visi Kementerian Luar Negeri RI, terdapat kepentingan nasional Indonesia yang diterjemahkan kedalam “Sapta Dharma Caraka”, yang beberapa diantaranya berisi sebagai berikut:

- a. Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia.
- b. Memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme.
- c. Meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati HAM dan memajukan perdamaian dunia.

IACS sebagai program oleh Kementerian Luar Negeri RI pun berkontribusi pada upaya realisasi kepentingan nasional tersebut. Pada poin pertama yakni memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap Indonesia, IACS berupaya menggalang dukungan internasional melalui jalinan *people to people contact* yang terjadi dengan para peserta program IACS. Para alumni IACS yang menjadi *friends of Indonesia* diharapkan mampu bersuara membela Indonesia apabila terjadi kesalahpahaman terkait Indonesia di dunia internasional. Hal ini didukung oleh pernyataan pihak Kementerian Luar Negeri RI dalam proses wawancara:

“...kita ciptakan friends of Indonesia. Jadi alumni-alumni itu kita sebut sebagai friends of Indonesia, yang biasanya kalo ada acara di kedutaan selalu kita undang. Dan mereka diharapkan akan membantu kita menyebarkan berita-berita yang benar tentang Indonesia. Bukan berita-berita yang salah atau setidaknya mereka mengcounter kalau ada berita yang salah”

Sementara itu pada poin kedua, yakni memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme, program IACS juga memiliki kontribusi yang sama.

Program IACS yang kini telah mencakup hingga total 74 negara di seluruh dunia secara tidak langsung telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut. Meluasnya cakupan negara peserta IACS bisa dikatakan sebagai upaya memperkuat multilateralisme. Hubungan diplomatik ini yang nantinya diharapkan mampu membawa pada jalinan kerjasama dengan Indonesia. Salah satu contoh adalah yang terjadi antara Indonesia dengan Cina. Cina merupakan negara mitra strategis Indonesia. Cina sendiri telah mengikuti program IACS sejak tahun 2006 hingga saat ini. Hubungan bilateral RI dengan Cina sendiri kini menjadi hubungan Kemitraan Strategis Komprehensif sejak tahun 2013. Meningkatnya perekonomian di kedua negara ini menjadi daya tarik warga kedua negara, baik di sisi perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, hingga budaya. Kerjasama pun terjalin, terutama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya<sup>82</sup>.

Sementara itu, IACS juga berperan dalam meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati HAM dan memajukan perdamaian dunia. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu peserta program IACS, didapati bahwa para peserta melihat toleransi yang ada pada masyarakat Indonesia saat mengikuti program IACS. Para peserta yang sebagian besar non muslim ikut merasakan dan melihat bagaimana suasana buka puasa bersama, yang membuat mereka terkesan dengan nilai toleransi yang ada pada masyarakat Indonesia. Mereka melihat, meski masyarakat Indonesia sangat majemuk, namun nilai toleransi masih dijunjung tinggi<sup>83</sup>. Hal ini tentu menjadi stimulus yang baik dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Selain itu, adanya *cross culture interaction* yang terjadi saat penyelenggaraan program IACS bukan menjadi pembeda. *Cross culture interaction* tersebut justru menghasilkan *learning and sharing process*. Proses *learning and sharing* seperti ini yang akan melahirkan pemahaman yang lebih baik atau *better understanding* antara para peserta dengan

---

<sup>82</sup> Buku Diplomasi Indonesia 2014 oleh Kementerian Luar Negeri RI

<sup>83</sup> Wawancara dengan Halen Parti, Peserta program IACS 2018

sesama peserta, juga antar peserta dengan masyarakat Indonesia setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesepahaman satu sama lain, sehingga mampu meminimalisir terjadinya konflik. Secara tidak langsung, ini sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia terkait upaya memajukan perdamaian dunia.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa IACS memiliki pengaruh dan tujuan sendiri dalam upaya pencapaian kepentingan nasional. Aktifitas *people to people contact* dengan banyak negara di dunia berdampak pada pembentukan citra Indonesia di mata internasional. Selain itu, IACS juga mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional dalam konteks memperoleh dukungan internasional terkait kedaulatan Indonesia, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak internasional.

#### **4.3.2 Kontribusi Diplomasi Kebudayaan melalui IACS dalam Mendukung Pertahanan Negara**

Dari penjelasan sebelumnya terkait tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri dan dikaitkan dengan UUD 1945 pasal 8 ayat 3 mengenai tugas Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam menjalankan pemerintahan darurat, maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran pertahanan negara. Segala kebijakan yang dijalankan Kementerian Luar Negeri tentu berorientasi pada kedaulatan bangsa dan negara. Lalu bagaimana IACS sebagai salah satu program oleh Kementerian Luar Negeri RI berperan dalam mendukung upaya pertahanan negara, terutama pertahanan nirmiliter? Perlu diperhatikan bahwa ilmu pertahanan kini memang telah mengalami perluasan makna. Ilmu pertahanan kini bukan hanya mengenai “strategi” atau “ilmu militer” yang mempelajari penggunaan angkatan bersenjata saja. Ilmu pertahanan juga bukan semata-mata mengenai taktik atau seni perang yang dimanfaatkan pada saat kondisi perang. Menurut Makmur Supriyatno, ilmu pertahanan adalah suatu ilmu yang mempelajari

bagaimana pengelolaan sumber daya dan kekuatan nasional baik pada saat masa damai, perang, dan sesudah perang, dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri<sup>84</sup>. Ancaman yang dimaksudkan disini pun bukan lagi hanya terbatas pada bentuk ancaman bersifat militer, melainkan juga pada bentuk ancaman nonmiliter yang mampu mengancam keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Kementerian Luar Negeri RI sebagai kementerian di luar bidang pertahanan merupakan sumber kekuatan pertahanan nirmiliter yang dibutuhkan dalam merespon ancaman yang bersifat nonmiliter. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam buku putih pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan. Terkait dengan pertahanan nirmiliter, Kementerian/Lembaga merupakan kekuatan pertahanan nirmiliter yang dalam peran, tugas dan kewenangannya mengelola dan membina sumber daya nirmiliter yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat<sup>85</sup>. Melalui program IACS, Kementerian Luar Negeri RI menjalankan fungsi pertahanan nirmiliter. IACS memang mengedepankan pada aspek *people to people contact*, dimana artinya adalah hubungan antar masyarakat menjadi titik utama dalam aktifitas diplomasi yang dilakukan. Kontak langsung yang terjadi antara para peserta IACS dengan masyarakat Indonesia diharapkan menjadi jembatan penghubung yang mampu mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam konteks pertahanan. Adriana Elisabeth selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI menambahkan bahwa diplomasi kebudayaan yang dilancarkan melalui IACS ini merupakan dukungan terhadap pertahanan nirmiliter. Ia mengatakan,

“kalau pertahanan non senjata, yang kita harus dekati kan sebenarnya masyarakatnya dulu. Kalo kita memahami mereka,

---

<sup>84</sup> Makmur Supriyatno. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

<sup>85</sup> Situs Resmi Kementerian Pertahanan RI. 2015. Kementerian/Lembaga Menjadi Unsur Utama Menghadapi Ancaman Pertahanan Nirmiliter [Online] <https://www.kemhan.go.id/2015/06/12/kementerianlembaga-menjadi-unsur-utama-menghadapi-ancaman-pertahanan-nirmiliter.html> Diakses pada 13 Januari 2019

kemudian orang lain juga memahami kultur kita, terus ada trust diantara kita, kita kemudian bisa respect, satu sama lain. Itu kan bisa ada sebuah channel untuk melakukan komunikasi secara lebih baik. Ketika kita saling percaya kan kita, juga buat apa ribut dan sebagainya. Menurut saya sangat penting, sangat penting. Karena juga, kalo kita lihat esensi dari diplomasi sendiri kan dua hal. Tentang bagaimana kita berkomunikasi baik, dan bagaimana kita bernegosiasi. Nah once kita tahu kultur mereka, atau orang lain mengetahui kultur kita, kan lebih banyak hal-hal yang kita bisa diskusikan”<sup>86</sup>

*People to people contact* memang merupakan aspek pertahanan yang paling terlihat dari program IACS. Jalinan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara lain membentuk sebuah pertahanan nirmiliter. Pertahanan nirmiliter yang dimaksud adalah kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat asing, kemampuan sosial yang ditunjukkan dari pengenalan budaya, serta kemampuan moral yang ditunjukkan dalam bentuk mempromosikan budaya kerukunan, keramah-tamahan, dan persatuan Indonesia dalam rangkaian penyelenggaraan<sup>87</sup>. Seluruh kemampuan tersebut terdapat pada penyelenggaraan program IACS. *People to people contact* begitu penting, hingga Presiden Joko Widodo sepakat untuk mengedepankan *people to people contact* dengan negara-negara di dunia, termasuk Australia demi terciptanya hubungan baik dan stabil, serta kemungkinan terjalinnya kerjasama strategis antara Indonesia dan Australia<sup>88</sup>. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui *people to people contact* dalam program IACS ini akan tercipta sebuah *understanding* dari masyarakat asing terhadap Indonesia. Melalui pemahaman yang tepat mengenai Indonesia, maka akan mendorong untuk terciptanya *trust* atau rasa percaya sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya konflik yang mampu menjadi ancaman bagi sebuah negara.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Adriana Elisabeth pada 12 November 2018

<sup>87</sup> Makarim Wibisono, Tri Legionosuko dan Eka Yunida. 2017. Peran Diaspora dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus Diaspora Indonesia di Belgia). Jurnal Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan

<sup>88</sup> Situs Resmi Presiden RI. 2017. Jalin Hubungan Lewat People to People Contact. [Online] <http://presidenri.go.id/berita-aktual/jalin-hubungan-lewat-people-to-people-contact.html> Diakses pada 4 Februari 2019

Ini sesuai bila dikaitkan dengan apa yang terjadi pada Korea Utara beberapa tahun kemarin, dimana Korea Utara memutuskan untuk menutup diri dari segala aktifitas hubungan internasional. Hal tersebut berdampak pada Korea Utara yang terasingkan dari dunia internasional, dan timbul ketegangan politik dengan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat. Adriana Elisabeth juga menambahkan bahwa program IACS ini bisa menjadi *channel* yang membuka jalur komunikasi yang lebih baik antara Indonesia dengan dunia internasional. Hal ini tentu menjadi sangat krusial dimana komunikasi yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pihak internasional tentu akan membuka kesempatan-kesempatan kerjasama, yang mampu mendukung usaha pertahanan negara.

Melalui penjelasan diatas, dapat dipastikan bahwa Kementerian Luar Negeri RI melalui program beasiswa IACS ini berhasil menjalankan perannya. Hal ini dikarenakan IACS sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Bennet, bahwa Kementerian Luar Negeri RI sebagai organisasi atau badan dengan ruang lingkup internasional memiliki peran sebagai berikut<sup>89</sup>:

- a. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang. Dimana diharapkan kerjasama yang terjalin akan membawa keuntungan bagi setiap negara yang terlibat
- b. Menyediakan jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara sehingga dapat mempermudah dan memperkaya akses komunikasi apabila terjadi ketegangan di masa mendatang.

Melalui penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa selain merupakan diplomasi budaya, IACS juga merupakan wujud diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Memang pada awalnya, istilah diplomasi pertahanan sangat erat kaitannya dengan pengerahan kekuatan angkatan bersenjata. Hal itu dimulai dengan dirilisnya dokumen resmi oleh kementerian pertahanan Inggris pada tahun 1998. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan situasi tataran

---

<sup>89</sup> Leroy Bennet. 1995. *International Organization, Principle and Issue*. New Jersey: Prentice Hall Inc

dunia internasional yang dinamis, maka diplomasi pertahanan pun mengalami perluasan makna. Diplomasi pertahanan dapat diartikan sebagai wujud diplomasi yang digunakan untuk meningkatkan kerjasama militer, mengurangi ketegangan yang terjadi antar negara, hingga menjaga aliansi dan membuka kesempatan untuk terwujudnya kerjasama atau latihan bersama<sup>90</sup>. Pedrason dalam disertasinya juga berpendapat bahwa diplomasi pertahanan kini mengalami perluasan makna, dan tidak lagi dapat disamakan dengan diplomasi militer. Diplomasi pertahanan merupakan segala metode serta strategi yang diterapkan oleh suatu negara dengan mengerahkan segala upaya di bidang ekonomi, budaya, kerjasama politik serta kerjasama pertahanan. Melalui dimensi-dimensi tersebut diharapkan mampu merekatkan hubungan antar negara serta membangun kepercayaan (*mutual trust*) dan *confidence building measures* (CBM)<sup>91</sup>. Dengan begitu, berdasarkan pada konten dan tujuan akhir yang ingin dicapai, maka IACS dapat dikatakan sebagai diplomasi kebudayaan, yang secara bersamaan berfungsi sebagai diplomasi pertahanan yang dapat mendukung pertahanan negara.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, IACS merupakan bentuk *soft power* yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia, salah satunya tentunya adalah ditinjau dari segi pertahanan negara. Sebagai bentuk diplomasi pertahanan melalui dimensi budaya, IACS dengan peran uniknya mampu berkontribusi yakni melalui *people to people contact* yang terjadi diantara para peserta program IACS dengan masyarakat setempat selama kegiatan beasiswa tersebut berlangsung. Proses *people to people contact* tersebut akan memberikan pengalaman langsung kepada para peserta IACS yang berasal dari luar negeri untuk merasakan bagaimana keadaan sosial, seni, dan budaya Indonesia yang sebenarnya. Pesan bahwa

---

<sup>90</sup> Mulloy G. 2007. *Japan's Defense Diplomacy and "Cold Peace" in Asia*. Asia Journal of Global Studies

<sup>91</sup> Rodon Pedrason. "ASEAN's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community". Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg Institut Fur Politische Wissenschaft,

Indonesia merupakan negara yang “aman” itulah yang ingin disebarluaskan melalui program IACS ini<sup>92</sup>.

Hal ini terkait dengan kondisi Indonesia pada awal era reformasi yang tidak stabil. Kondisi politik yang belum stabil hingga aksi terorisme Bom Bali pada tahun 2002 berdampak pada citra negatif Indonesia di dunia internasional. Untuk itu lah pada tahun 2003, program IACS dicetuskan untuk pertama kalinya untuk merespon bentuk ancaman yang dapat mengancam tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Ini didukung oleh pernyataan Dr. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI yang menjabat pada saat itu. Beliau mengatakan:

“....wajah Indonesia babak belur pada awalnya. Karena itu kita ingin menampilkan, wajah Indonesia itu yang gini lho (yang positif). Yang sejuk, yang indah, yang cantik. Dan dari pengalaman 3 bulan disini mereka akan jadi juru bicara Indonesia. “Indonesia tidak begitu, tidak seperti yang digambarkan seperti negara yang penuh dengan bom, kerusuhan, saling bunuh”. Bukan karakternya kan, dia tahu sendiri karakter kita bukan seperti itu. Jadi kalau disebut apakah bom bali termasuk dari satu gambaran tadi. Kita yang ingin menampilkan wajah kita yang lebih baik daripada yang dikenal pada saat awal reformasi, bom dimana-mana, rusuh dimana-mana, ethnic conflict dimana-mana. Jadi menurut saya...ya ada benarnya. IACS memang digunakan salah satunya untuk memperbaiki perspektif buruk tersebut.”<sup>93</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa citra sebuah negara di dunia internasional bukan sesuatu yang bisa dikesampingkan begitu saja. Hal ini terbukti dengan apa yang terjadi pada Venezuela. Krisis ekonomi yang melanda Venezuela pada 2016 berdampak buruk pada kerjasama bilateral antara Venezuela dengan Tiongkok<sup>94</sup>. Selain berdampak pada kerjasama yang terjalin, tingkat kesejahteraan masyarakat pun menurun drastis. Kondisi perekonomian negara yang runtuh menyebabkan jutaan

<sup>92</sup> Maylani Kurnia. 2015. Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Sebagai Sarana Diplomasi Kebudayaan Indonesia. Surakarta: Universitas Slamet Riyadi

<sup>93</sup> Wawancara dengan Dr. Hassan Wirajuda pada 9 Oktober 2018

<sup>94</sup> Dykha Ancikita Macintas. 2018. Dampak Krisis Ekonomi Venezuela Tahun 2016 Terhadap Kerjasama Bilateral Tiongkok – Venezuela. Universitas Pembangunan “Veteran” Yogyakarta

warga Venezuela memilih untuk bermigrasi meninggalkan Venezuela, sehingga keluarga pun bercerai berai<sup>95</sup>.

Kesejahteraan masyarakat merupakan poin penting dalam kepentingan nasional Indonesia yang erat kaitannya dengan perjuangan pertahanan nirmiliter negara. Untuk itu wajah dan keadaan Indonesia yang baik perlu diproyeksikan ke dunia internasional, sehingga mampu membuka pintu kerjasama dan investasi yang datang ke Indonesia. Hal ini terkait dengan usaha pemerintah untuk terus memajukan pembangunan secara menyeluruh di Indonesia. Tingkat investasi memang hal yang cukup berpengaruh jika dikaitkan dengan pertahanan negara. Hal ini berpengaruh karena tingkat investasi akan berdampak secara positif pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia<sup>96</sup>. Apabila tingkat penyerapan tenaga kerja menunjukkan gambaran yang positif, maka hal ini juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang baik secara tidak langsung akan membentuk sumber daya manusia yang mampu berperan sebagai komponen pendukung yang baik pula, di dalam konteks kekuatan pertahanan negara. Selain itu, investasi juga berpengaruh terhadap perekonomian negara. Tingkat investasi yang terdapat pada suatu negara akan mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut, tergantung pada perkembangan teknologi, penurunan tingkat suku bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya<sup>97</sup>.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, CBM atau *Confidence Building Measure* merupakan segala bentuk upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, *the level of uncertainty* atau tingkat ketidakpastian diantara negara-negara. Tingkat ketidakpastian yang tinggi akan berdampak pada kecurigaan yang dapat terjadi sehingga mampu

---

<sup>95</sup> BBC Indonesia. 2018. Dampak Krisis Venezuela: Keluarga Tercerai Berai. [Online] <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45368100> Diakses pada 13 Januari 2019

<sup>96</sup> Rini Sulistiawati. 2012. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*

<sup>97</sup> Mubyarto. 2003. Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila. Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 18, No. 3

memicu konflik diantara pihak-pihak yang bertikai<sup>98</sup>. Untuk itu pemerintah Indonesia pun perlu untuk memiliki tingkat CBM yang baik dengan pihak internasional. CBM sendiri dapat dilakukan pada tingkat unilateral, bilateral, hingga multilateral. Program IACS dapat dikatakan berada pada tingkat multilateral, dengan cakupan 74 negara. CBM pada intinya bertujuan untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan dari pihak lain. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut, tentunya dibutuhkan proses yang berkelanjutan dan bertahap. Pelaksanaan IACS yang terus dilaksanakan dari tahun ke tahun secara tidak langsung menunjukkan konsistensi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri RI dalam menjual program IACS ke negara-negara di dunia.

Tabel 4.1 Tabel Tipologi CBMs

	<i>Unilateral</i>	<i>Bilateral</i>	<i>Multilateral</i>
<b>Military CBMs</b>			
1. <i>Communications</i>		<i>Hotlines; regular bilateral dialogue</i>	<i>Track two dialogues</i>
2. <i>Transparency</i>	<i>Defense white paper; army registry; notification measures</i>	<i>Observance at military exercises; intelligence exchange</i>	<i>Common outline for defense publications</i>
3. <i>Consultation</i>		<i>Joint commission</i>	<i>ARF; ASEAN; Senior Officials Meeting</i>
4. <i>Goodwill</i>	<i>Policy of non-interference in internal affairs</i>	<i>Visit; cross-training; code of conduct</i>	<i>Code of conduct</i>
5. <i>Constraints</i>	<i>Rules of engagement; no first-strike declaration; troop reduction</i>	<i>Non-aggression agreement; troop reduction agreement</i>	<i>Code of conduct; Disarmament and demilitarization agreements</i>
<b>Economic CBMs</b>	<i>Aid; investment</i>	<i>Prefential term of trade</i>	
<b>Socio-cultural CBMs</b>		<i>Increase people-to-people links</i>	
<b>Political CBMs</b>	<i>Curbing propaganda</i>	<i>Contacts between political parties, parliaments, judiciary</i>	

Sumber: Firstyarinda Valentina Indraswari. 2012.

<sup>98</sup> Brad Glosserman. 2005. *Cross-Strait Confidence Building Measures*. Honolulu: Issues & Insights

Konsistensi Kementerian Luar Negeri RI dalam menjual program IACS ini bertujuan untuk menjalin atau mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Dimana pada akhirnya, mendapatkan *trust* melalui proses CBM merupakan tujuan yang ingin dicapai. Diharapkan dengan semakin eratnya hubungan bilateral yang terjalin, akan diiringi dengan kemungkinan terbentuknya kemitraan strategis dalam sektor, ekonomi, politik, maupun pertahanan. CBM sendiri memiliki berbagai ukuran dan bentuk pelaksanaan, sebagaimana yang telah dirangkum oleh Baviera dalam tulisan Indraswari pada tabel tipologi pada tabel 4.1<sup>99</sup>

Melalui informasi yang tertera pada tabel 4.1, dapat dilihat bahwa CBM memiliki berbagai dimensi dalam ukuran dan praktik kegiatannya. Tabel diatas menunjukkan bahwa CBM tidak hanya dilakukan dalam konteks militer, namun juga ekonomi, sosial budaya, serta politik. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam mencapai CBM tentunya disesuaikan dengan aspek terkait. Bila ditinjau dari tabel tersebut, maka IACS dapat dikategorikan pada aspek sosial budaya. Tertera pula pada tabel tersebut bahwa kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperoleh CBM melalui aspek sosial budaya yakni dengan cara meningkatkan *people to people links*, atau dengan kata lain meningkatkan hubungan langsung antar masyarakat. Dalam hal ini, *people to people links* yang terjadi pada pelaksanaan program IACS adalah kontak langsung antara warga asing para peserta program IACS, dengan masyarakat lokal setempat di Indonesia. Dalam salah satu wawancara peneliti dengan salah satu peserta program IACS pada tahun 2018, IACS sangat berkontribusi dalam menanamkan rasa cinta terhadap Indonesia dalam diri para peserta program tersebut.

“Berbicara soal Seni dan budaya berarti kita bicara soal rasa atau perasaan, secara tidak langsung atau tidak disadari IACS sudah mengajarkan rasa cinta tanah air bagi foreigner ketika mereka sudah cinta tanah air maka hubungan antar negara terjalin erat tanpa harus di paksakan. IACS juga mendukung dalam pembangunan suatu kepercayaan dengan negara lain, sehingga

---

<sup>99</sup> Firstyarinda Valentina Indraswari. 2012. Pelaksanaan Confidence Building Measures (CBMs) Pada Konflik Korea Selatan-Korea Utara Periode 2008-2011. Jakarta: Universitas Indonesia

hubungan diplomatik tetap terjaga, mengurangi konflik antar negara, ketegangan ataupun konflik fisik, karena apa Indonesia sudah membangun hubungan kerja sama lewat strategi soft diplomacy”<sup>100</sup>.

Proses terbentuknya CBM antara Indonesia dengan dunia internasional melalui IACS ini juga terjalin saat proses seleksi peserta program beasiswa ini. Menurut data yang diperoleh pada proses wawancara dengan pihak Kementerian Luar Negeri RI, proses seleksi peserta program ini melibatkan pihak KBRI dan Konsulat Jenderal RI di negara-negara asal para peserta. Kontak langsung yang terjadi antara KBRI maupun Konsulat Jenderal RI di negara setempat dengan para calon peserta program IACS ini secara langsung dirasa akan memberikan dampak positif pada CBM yang terjalin antara Indonesia dengan masing-masing negara.

Kementerian Pertahanan juga turut berperan dalam aktifitas diplomasi budaya. Dalam acara bertajuk MBBI (Malam Budaya dan Bahasa Internasional), Kementerian Pertahanan mengumpulkan siswa-siswa dari berbagai negara, untuk menyatukan para peserta tersebut sehingga diharapkan mampu meningkatkan persahabatan dan kerjasama harmonis di bidang pertahanan<sup>101</sup>. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa melalui IACS ini pemerintah mengharapkan terjalinnya hubungan bilateral yang baik, yang mampu menghasilkan sebuah kemitraan strategis. Salah satu negara peserta IACS yang pada akhirnya berlanjut pada kerjasama jangka panjang adalah Perancis. Perancis telah bergabung menjadi peserta program IACS sejak tahun 2010. Perancis juga merupakan salah satu negara yang melakukan praktik diplomasi budaya. Bentuk diplomasi budaya yang dilakukan Perancis dengan Indonesia yakni melalui IFI (*Institut Francais Indonesia*), yang merupakan bagian dari kedutaan besar Perancis untuk Indonesia. IFI merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam kerjasama antara

---

<sup>100</sup> Wawancara via E-mail dengan Halen Parti, seorang peserta program IACS 2018

<sup>101</sup> Kementerian Pertahanan RI. 2016. Gelar MBBI ke 15 Kerjasama Pertahanan dengan Pendekatan Budaya. [Online] <https://www.kemhan.go.id/2016/11/08/gelar-mbbi-ke-15-kerjasama-pertahanan-dengan-pendekatan-budaya.html> Diakses pada 4 Februari 2019

Indonesia dan Perancis di bidang kebudayaan, pendidikan, linguistik, sains dan teknologi, serta pendidikan tinggi<sup>102</sup>. Diplomasi kebudayaan yang dilakukan Perancis ini berdampak pada peningkatan hubungan baik, jalinan *people-to-people-contact* antara masyarakat Perancis dan Indonesia.



Gambar 4.5 Presiden Joko Widodo menyambut Presiden Perancis Francois Hollande di Jakarta

Dari aspek pertahanan, hal ini berdampak pada CBM (*Confidence Building Measure*) antara kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa CBM yang terjalin baik antara kedua negara ini mengantarkan pada berbagai bentuk kerjasama yang terjadi, seperti di bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, industri pertahanan, sosial budaya (*people-to-people contacts*), dan penanganan pada dampak perubahan iklim. Kerjasama strategis tersebut terus terjalin hingga saat ini, bahkan pada Maret 2017 silam Francois Hollande selaku presiden Perancis yang menjabat pada saat itu melakukan pertemuan bilateral ke Jakarta dan bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen penguatan kerjasama khususnya di bidang

---

<sup>102</sup> Situs resmi IFI <https://www.ifi-id.com/id#> Diakses pada 24 Juli 2018

ekonomi kreatif, pendidikan, maritim, pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable cities development*), energi, pertahanan dan infrastruktur.<sup>103</sup>

Selain Perancis, Cina merupakan negara mitra strategis Indonesia. Cina sendiri telah mengikuti program IACS sejak tahun 2006 hingga saat ini. Hubungan bilateral RI dengan Cina sendiri kini menjadi hubungan Kemitraan Strategis Komprehensif sejak tahun 2013. Meningkatnya perekonomian di kedua negara ini menjadi daya tarik warga kedua negara, baik di sisi perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, hingga budaya. Kerjasama pun terjalin, terutama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya<sup>104</sup>. Hal ini mengindikasikan tercapainya CBM diantara Indonesia dan Cina yang berujung pada kerjasama komprehensif. Keikutsertaan Cina dalam program IACS sejak tahun 2006 ini juga lah yang mampu berkontribusi untuk mendorong terciptanya CBM diantara Indonesia dengan Cina.

---

<sup>103</sup> Situs resmi Kementerian Luar Negeri RI. Hubungan Bilateral Perancis – Indonesia. [Online] <https://www.kemlu.go.id/paris/id/Pages/RI-France.aspx> Diakses pada 27 Juli 2018

<sup>104</sup> Buku Diplomasi Indonesia 2014 oleh Kementerian Luar Negeri RI

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan.

Berikut adalah kesimpulan yang berhasil dibentuk mengenai bagaimana peran program IACS sebagai Diplomasi Kebudayaan oleh Indonesia dalam mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional.

- a. IACS membantu dalam membentuk citra positif Indonesia, yang selanjutnya akan dipancarkan ke dunia internasional. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk opini publik yang positif terhadap Indonesia. Opini publik yang positif tersebut diharapkan menjadi dukungan bagi upaya kebijakan politik yang dijalankan sehingga tercapai kepentingan nasional yang dicita-citakan.
- b. IACS mempererat hubungan bilateral maupun multilateral, sehingga mendorong terjalinnya kerjasama yang menjadi salah satu poin dalam kepentingan nasional Indonesia.
- c. IACS berkontribusi pada realisasi sistem politik luar negeri Indonesia yakni bebas-aktif. Seperti yang telah diketahui bahwa aktif dalam upaya perwujudan dunia merupakan salah satu dari kepentingan nasional Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.

Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan terkait dengan kontribusi yang diberikan IACS dalam pertahanan negara.

- a. Jawaban atas bagaimana peran program IACS sebagai diplomasi kebudayaan oleh Indonesia dalam mendukung pertahanan negara adalah melalui proses terjadinya *people to people contact* antara para peserta asing program IACS dengan masyarakat Indonesia setempat.
- b. *People to people contact* tersebut akan meningkatkan kesepahaman antara pihak terkait, sehingga mampu meminimalisir terjadinya konflik.
- c. Dalam mendukung pertahanan negara, IACS mendukung salah satu kebijakan pertahanan 2018 oleh Kementerian Pertahanan, yakni mempertahankan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Restorasi sosial disini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia tetap

menjunjung tinggi dan tidak melupakan nilai-nilai luhur kebangsaan, sehingga tidak kehilangan jati diri bangsanya.

- d. *Core activity* dari IACS dimana adalah *people to people contact* sejalan dengan inti dari CBM. Terutama di bidang *Socio-cultural CBMs*, yang menitikberatkan pada peningkatan aktifitas *people to people contact*.
- e. IACS berkontribusi dalam meningkatkan CBM Indonesia dengan negara-negara lain, sehingga memungkinkan terjalinnya kerjasama lebih lanjut.

## **5.2 Rekomendasi**

### **5.2.1 Rekomendasi Teoritis**

Mendengar kata pertahanan, bagi para awam memang mungkin akan otomatis mengarah pada unsur militer. Ini tidak sepenuhnya salah, karena memang kekuatan militer Indonesia, yakni TNI sangat jelas tergambar sebagai 'penjaga' utama negara. Namun, bagi para akademisi tentunya hal ini perlu ditinjau kembali. Situasi tataran politik dunia internasional yang dinamis menyebabkan terjadinya ancaman-ancaman nontradisional yang sifatnya nonmiliter. Ancaman nonmiliter tersebut dapat berupa ancaman terhadap ideologi, perdagangan manusia, narkoba, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal semacam ini tentu bukan menjadi tugas utama dari TNI sebagai unsur utama pertahanan militer, melainkan menjadi tugas lembaga dan kementerian di luar bidang pertahanan.

Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan lebih luas mengenai unsur pertahanan, khususnya pertahanan nirmiliter. Diplomasi pertahanan yang pada awalnya sangat identik dengan pengerahan angkatan bersenjata, kini menjadi lebih luas maknanya. Hal ini didukung oleh Rodon Pedrason, yang dalam disertasinya menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan kini mengalami perluasan makna, dan tidak lagi dapat disamakan dengan diplomasi militer. Diplomasi pertahanan merupakan segala metode serta strategi yang diterapkan oleh suatu

negara dengan mengerahkan segala upaya di bidang ekonomi, budaya, kerjasama politik serta kerjasama pertahanan.

Disamping itu, citra sebuah negara di dunia internasional dianggap sangat penting dan berperan dalam jalannya pemerintahan suatu negara. Citra suatu negara akan berdampak pada kelancaran upaya pencapaian kepentingan nasional negara tersebut. Untuk itu diharapkan selain penguatan kekuatan militer, pembentukan citra positif sebuah negara juga perlu terus digalakan. IACS sendiri sebagai program dibawah Kementerian Luar Negeri dapat berperan dalam membentuk citra positif indonesia di mata dunia. Untuk itu, adanya sinergitas yang baik antara kekuatan militer dan nonmiliter juga perlu dilakukan lebih komprehensif.

Dalam buku putih pertahanan oleh Kementerian Pertahanan sendiri telah disebutkan mengenai kekuatan militer dan nonmiliter sebagai unsur pertahanan negara. Untuk itu, integrasi serta sinergitas dan kerjasama yang komprehensif diantara Kementerian Pertahanan dan Lembaga serta Kemeterian di luar bidang pertahanan diperlukan, sehingga tercipta sistem pertahanan semesta yang dicita-citakan. Dengan begitu, keamanan negara dan seluruh masyarakat dapat lebih terjamin ditengah-tengah kondisi global yang dinamis.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Kementerian Luar Negeri sebagai regulator serta pelaksana program IACS telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Memancarkan sistem nilai yang dianut Indonesia ke dunia internasional merupakan langkah yang baik. Penggunaan dimensi budaya sebagai bentuk diplomasi 'modern' dalam membentuk citra positif juga langkah yang perlu diapresiasi. Namun, bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini.

Ditemukan bahwa salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program IACS yakni keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan IACS tiap tahunnya berdampak pada tingkat perkembangan program yang kurang optimal.

Kuota jumlah peserta tiap tahunnya juga dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang disisihkan. Hal ini patut disayangkan, apabila melihat dari signifikansi program yang diberikan dalam membentuk citra positif dan menghasilkan *friends of Indonesia* di seluruh dunia. Untuk itu, diharapkan agar Kementerian Luar Negeri berupaya untuk memperbesar skala dari program IACS ini, sehingga akan dihasilkan lebih banyak alumni-alumni, yang biasa disebut *friends of Indonesia*, di seluruh dunia. Alumni-alumni inilah yang diharapkan mampu menjadi kekuatan pertahanan Indonesia di luar negeri.

Selain itu, diharapkan dalam pelaksanaan program IACS ini Kementerian Luar Negeri dapat menjalin kerjasama dengan pihak *stakeholder* lain yang terkait. Kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dirasa dapat menjadi *partner* kerjasama yang baik dalam pelaksanaan program IACS. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan program ini dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, dan mampu secara optimal mendukung kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri Indonesia yang sedang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agmasari, S. (2018). Imbas Bom Surabaya, Sudah 13 Negara Keluarkan "Travel Advice". [Online] <https://travel.kompas.com/read/2018/05/16/192400427/imbas-bom-surabaya-sudah-13-negara-keluarkan-travel-advice> Diakses pada 31 Juli 2018
- Aguilar, M. (1996). *Cultural Diplomacy and Foreign Policy: German-American Relationship*. New York: Peter Lang
- Anwar, D.F. (1996). *Introduction*, dalam Indonesia's Strategic Culture: Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara dan Hankamrata. Australia-Asia Papers
- Badan Pusat Statistik. [Online] <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/01/1468/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2017-mencapai-1-15-juta-kunjungan--.html> Diakses pada 29 Juli 2018
- Bakker, J.W.M. (1984). *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Bakrie, C.R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- BBC Indonesia. (2018). Dampak Krisis Venezuela: Keluarga Tercerai Berai. [Online] <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45368100> Diakses pada 13 Januari 2019
- Bennet, L. (1995). *International Organization, Principle and Issue*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Cottey, A. (2004). *Reshaping Defense Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxon: Routledge
- Cresswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- DW. (2018). Diplomasi K-Pop Korea Selatan Yang Meriah Menggoyang Pyongyang. [Online] <https://www.dw.com/id/diplomasi-k-pop-korea-selatan-yang-meriah-menggoyang-pyongyang/a-43224685> Diakses pada 24 Juli 2018
- Efendi, T.D. (2011). *Diplomasi Publik Jepang: Perkembangan dan Tantangan*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Gita, I.G.A. (2012). *Analisis Smart Power dalam Strategi Militer Amerika Serikat Melawan Al-Qaeda (2009-2012)*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Glosserman, B. (2005). *Cross-Strait Confidence Building Measures*. Honolulu: Issues & Insights
- Holsti, K.J. (1984). *International Politics, A Framework for Analysis Third Edition*. New Delhi: Prentice
- Huberman, M. dan Miles, M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publication
- Huntington, S.P. 1993. "*The Clash of Civilization*". Foreign Affairs
- IFI (Institut Francais Indonesia) <https://www.ifi-id.com/id#> Diakses pada 24 Juli 2018
- Indraswari, F.V. (2012). *Pelaksanaan Confidence Building Measures (CBMs) Pada Konflik Korea Selatan-Korea Utara Periode 2008-2011*. Jakarta: Universitas Indonesia
- International Affairs and Defence Section. 1998. *Strategic Defence Review White Paper*. United Kingdom: British Ministry of Defence
- Jackson, R. dan Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jackson, W. (1995). *Approaches to Methods*. Scarborough: Prentice-Hall Canada
- Javaid, U. (2010). *Confidence Building Measures in Nuclear South Asia: Limitations and Prospects*. Journal of South Asian Studies
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Buku Diplomasi Indonesia 2014*
- Kementerian Luar Negeri RI. *Hubungan Bilateral Perancis – Indonesia*. [Online] <https://www.kemlu.go.id/paris/id/Pages/RI-France.aspx> Diakses pada 27 Juli 2018
- Kementerian Luar Negeri RI. (2017). *2018 Indonesian Arts and Culture Scholarship*. [Online] <https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/2018-Indonesian-Arts-and-Culture-Scholarship-.aspx> Diakses pada 20 Juli 2018

- Kementerian Luar Negeri RI. (2015). Struktur Kementerian Luar Negeri. [Online] <https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/struktur-kemlu/Organization.aspx?kementerianID=6> Diakses pada 4 November 2018
- Kementerian Luar Negeri RI. (2015). Visi Kementerian Luar Negeri. [Online] <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/landasan-visi-misi-polugri/Pages/Visi-Kementerian-Luar-Negeri.aspx> Diakses pada 4 November 2018
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia
- Kementerian Pertahanan RI. (2016). Gelar MBBI ke 15 Kerjasama Pertahanan dengan Pendekatan Budaya. [Online] <https://www.kemhan.go.id/2016/11/08/gelar-mbbi-ke-15-kerjasama-pertahanan-dengan-pendekatan-budaya.html> Diakses pada 4 Februari 2019
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). Kementerian/Lembaga Menjadi Unsur Utama Menghadapi Ancaman Pertahanan Nirmiliter [Online] <https://www.kemhan.go.id/2015/06/12/kementerianlembaga-menjadi-unsur-utama-menghadapi-ancaman-pertahanan-nirmiliter.html> Diakses pada 13 Januari 2019
- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/ 1008 /M/ V /2017 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/02/LAMPIRAN-JAKHANNEG-2018-FINAL.pdf> pada 1 Januari 2019
- Komeini, Y. (2009). Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Tenggara dan Stagnasi Postur Pertahanan Indonesia Periode 2001-2004. Jakarta: Universitas Indonesia
- Kuntjaraningrat. (1979). Pengantar Antropologi Budaya. Jakarta: Aksara Baru
- Kurnia, M. (2015). Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Sebagai Sarana Diplomasi Kebudayaan Indonesia. Surakarta: Universitas Slamet Riyadi
- Kustiari, C.K. (2018). Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Hak Asasi Manusia Sebagai Penanggulangan Perdagangan Manusia (Studi Industri Perikanan Indonesia). Bogor: Universitas Pertahanan
- Laksmiana, E.A. (2012). *Regional Order by Other Means? Assessing the Rise of Defense Diplomacy in Southeast Asia*. Asian Security

- Lerche, C.O. dan Said, A.A. (1964). *The Concept of International Politics*. New Jersey: Prentice
- Li dan Karakowsky. (2001). "Do We see eye-to-eye? Implication of Cultural Differences for Cross-Cultural Management Research and Practice". *The Journal of Psychology*
- Liland, F. (1993). "Culture and Foreign Policy: An Introduction to Approaches and Theory". *Journal of Institut for Forsvarstudier*
- Macintas, D.A. (2018). Dampak Krisis Ekonomi Venezuela Tahun 2016 Terhadap Kerjasama Bilateral Tiongkok – Venezuela. Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta
- Majie, Z. 2002. "The Role of Soft Power in International Relations".
- Margono. Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional. Universitas Negeri Malang
- Mas'ood, M. (1989). Studi Ilmu Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- McDonald, J. (1991). *Further Exploration of Track Two Diplomacy, Timing the De-Escalation of International Conflict*. Syracuse University Press: Syracuse
- Moleong, L.J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Morgenthau, H. J. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*
- Mubyarto. (2003). Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila. Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 18, No. 3
- Mulloy, G. (2007). *Japan's Defense Diplomacy and "Cold Peace" in Asia*. *Asia Journal of Global Studies*
- Nye, J. (2008). *Public Diplomacy and Soft Power*. SAGE Journals
- Nye, J. (2004). *Soft Power and American Foreign Policy*. *Political Science Quarterly*
- Pedrason, R. "ASEAN's Defense Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defense Community". Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg Institut Fur Politische Wissenschaft
- Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan

fungsi eselon I kementerian negara. Diakses dari <https://pih.kemlu.go.id/files/Perpres%2024%20Tahun%202010.pdf> pada 9 November 2018

Perwita, A dan Yani, M.Y. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Pidato Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Der. Soz Gumilar Rusliwa Somantri mengenai jati diri bangsa pada Seminar Etnopedagogik dan Pengembangan Budaya Sunda pada 23 September 2010. Diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/SEMINAR\\_ETHNOPE-DAGOGY/Jati\\_Diri\\_Bangsa.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/SEMINAR_ETHNOPE-DAGOGY/Jati_Diri_Bangsa.pdf) pada 3 Januari 2019

Potensi Pariwisata Indonesia. [Online] <http://indonesia.go.id/in/potensi-daerah/pariwisata> Diakses pada 27 Juli 2018

Roy, S.L. (1995). Diplomasi. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada

Shoelhi, M. (2011). Diplomasi: Praktek Komunikasi Internasional. Bandung: Sembiosa Rekatama Media

Sinambela, A. (2007). Penjelasan Umum Mengenai Blue Print, Arah, dan Strategi Diplomasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Jakarta: Proceeding Bank Indonesia

Singh, B. dan Tan, S.S. (2011). *“From ‘Boots’ to ‘Brogues’ The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia”*. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies

Sitepu, P. A. (2011). Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu

Situs Resmi Presiden RI. 2017. Jalin Hubungan Lewat *People to People Contact*. [Online] <http://presidenri.go.id/berita-aktual/jalin-hubungan-lewat-people-to-people-contact.html> Diakses pada 4 Februari 2019

Soekanto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sulaiman, Y. (2016). *Indonesia’s Strategic Culture: The Legacy of Independence*. Journal of Strategic Asia

Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan

- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Syafwi, I. (2009). *Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Warsito, T. dan Kartikasari, W. (2007). *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Watson, A. (1984). *The Dialogues Between States*. London: Methuem
- Wibisono, M., Legionosuko, T., dan Yunida, E. (2017). Peran Diaspora dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus Diaspora Indonesia di Belgia). *Jurnal Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan*
- Wulandari, I. (2015). *Diplomasi Budaya Indonesia Masih Rendah*. [Online] <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/29/nwymzy346-diplomasi-budaya-indonesia-masih-rendah> Diakses pada 20 Juli 2018

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Gelar Nanggala Wahyu Sagara Putra, lahir di Surabaya pada 3 Juni 1994. Merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara pasangan Laksma TNI (Purn) Achmad Hadirat, M.Si (Han) dan Diah Wahjoeningrum. Menyelesaikan pendidikan di SD Hang Tuah 11 Gedangan-Sidoarjo dan lulus pada tahun 2006, SMP Al-Falah Deltasari Sidoarjo lulus pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo pada tahun 2012. Peneliti melanjutkan ke jenjang pendidikan Sarjana di Universitas Airlangga Surabaya, mengambil jurusan Sastra Inggris, dengan konsentrasi *Cultural Studies*. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada tahun 2016, peneliti juga tercatat sebagai salah satu Mahasiswa Berprestasi pada Wisuda Universitas Airlangga Periode Desember 2016. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan Strata 2 di Universitas Pertahanan pada Program Studi Diplomasi Pertahanan. Sebelumnya, peneliti mengawali karir profesional sebagai *Corporate and Marketing* di PT. Jawa Pos Koran, Surabaya. Selama menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan, peneliti bersama dengan rekan-rekan program studi Diplomasi Pertahanan melakukan penelitian mengenai “Hubungan Kerja Sama *Sister City* Surabaya-Kochi (Jepang) Ditinjau dari Perspektif Diplomasi Pertahanan” saat melakukan program Kuliah Kerja Dalam Negeri di Surabaya. Selain itu juga terlibat dalam penelitian mengenai *Belt and Road Initiative* oleh China saat proses Kuliah Kerja Luar Negeri di Beijing-Shanghai, China pada tahun 2018.

## LAMPIRAN 1

### PANDUAN WAWANCARA DENGAN Dr. HASSAN WIRAJUDA



### PERAN DIPLOMASI KEBUDAYAAN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN PERTAHANAN NEGARA: STUDI PROGRAM *INDONESIA ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP (IACS)* OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun peneliti, dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa Universitas Pertahanan Indonesia. Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujur-jujurnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab pertanyaan yang ada.

Peneliti adalah:

Nama : Gelar Nanggala Wahyu Sagara Putra  
Program Studi : Diplomasi Pertahanan  
Fakultas : Strategi Pertahanan  
Perguruan Tinggi : Universitas Pertahanan  
Alamat : Kawasan IPSC, Sentul, Sukahati, Citeureup, Bogor,  
Jawa Barat 16810  
Telp/E-mail : 08155068401 / [gelarnanggala2@yahoo.com](mailto:gelarnanggala2@yahoo.com)

## A. Deskripsi Penelitian

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap negara untuk dapat mempertahankan keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negaranya, termasuk Indonesia. Situasi dunia internasional yang dinamis dan anarki juga menimbulkan potensi-potensi ancaman yang mampu mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. Situasi dinamis politik internasional tersebut pula yang menyebabkan terjadinya pergeseran tren ancaman. Ancaman bersifat konvensional atau ancaman militer pun kini mulai ditinggalkan, mengingat resiko yang ditimbulkan. Besarnya biaya dan kemungkinan munculnya reaksi keras dunia internasional menjadi pertimbangan tersendiri untuk meninggalkan segala bentuk agresi militer.

Dalam buku putih pertahanan oleh Kementerian Pertahanan telah disebutkan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta. Dimana berarti seluruh sumber daya nasional yang dimiliki Indonesia akan dikerahkan dalam upaya mendukung pertahanan negara. Dengan kata lain, TNI disini bukanlah unsur satu-satunya dalam aspek pertahanan negara. Disebutkan bahwa dalam menghadapi ancaman non-tradisional atau ancaman nirmiliter, kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan mengambil peran sebagai unsur utama dalam aspek pertahanan non-militer.

Untuk itu, dalam penelitian kali ini peneliti ingin melihat peran kementerian luar negeri Republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam urusan luar negeri dalam konteks upaya pencapaian kepentingan nasional, termasuk pertahanan negara. Wujud diplomasi kebudayaan yang dilakukan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui program *Indonesia Arts and Culture Scholarship* menarik peneliti untuk dijadikan sebagai objek yang akan diteliti. Peneliti akan berfokus pada bagaimana program *Indonesia Arts and Culture Scholarship* sebagai wujud diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui kementerian luar negeri, dalam mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional. Selain itu, peneliti juga akan melihat bagaimana diplomasi kebudayaan

melalui program IACS ini mampu berkontribusi pada pertahanan nirmiliter negara.

## **B. Panduan Wawancara**

1. Apa yang melatarbelakangi pertama kali dicetuskannya program IACS pada tahun 2003 silam?
2. Apakah ada hubungan antara dicetuskannya program IACS pada tahun 2003 dengan insiden bom Bali pada tahun 2002? Apakah program IACS ini menjadi salah satu upaya untuk membentuk kembali citra positif Indonesia di dunia internasional setelah peristiwa bom Bali 2002?
3. Apa yang membuat bapak selaku menteri luar negeri yang menjabat pada waktu itu, untuk akhirnya menyetujui dicetuskannya program IACS tersebut?
4. Dari mata seorang diplomat dan mantan menteri luar negeri seperti bapak, bagaimana peran wujud diplomasi kebudayaan semacam ini dalam praktik hubungan internasional?
5. Program IACS rutin dilaksanakan tiap tahunnya dari tahun 2003 hingga 2018. Pada masa bapak menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia, Hasil atau manfaat apa saja yang ditimbulkan oleh program IACS dalam aspek pertahanan? Adakah kerjasama lebih lanjut yang dihasilkan antara Indonesia dengan negara asal peserta program IACS?
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam program ini? Apakah Kemenlu RI melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan program IACS?

7. Menurut bapak sebagai praktisi dalam dunia hubungan internasional, apakah program IACS berkontribusi pada CBM yang dimiliki Indonesia terhadap pihak internasional? Jika iya, bagaimana kontribusi yang diberikan?
  
8. Sebagai seorang diplomat, bagaimana bapak melihat peran IACS dalam mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia internasional?

**LAMPIRAN 2**  
**PANDUAN WAWANCARA DENGAN**  
**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**



**DIPLOMASI KEBUDAYAAN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN**  
**KEPENTINGAN NASIONAL DAN PERTAHANAN NEGARA: STUDI**  
**PROGRAM *INDONESIA ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP (IACS)***  
**OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**Panduan Wawancara**

1. Apa tugas pokok dari Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia?
2. Apa yang melatarbelakangi pertama kali dicetuskannya program IACS pada tahun 2003 silam?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam program ini? Apakah Kemenlu RI melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan program IACS?
4. Apa tujuan pokok dari program IACS tersebut?
5. Bagaimana respon negara lain atas program IACS dari tahun ke tahun?
6. Apa saja kegiatan yang terdapat dalam program IACS tersebut?
7. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program IACS? Jika ada apa saja kendala tersebut?
8. Apa saja dampak yang dirasakan oleh Kemenlu dan Indonesia secara keseluruhan dari program IACS?

9. Hasil atau manfaat apa saja yang ditimbulkan oleh program IACS dalam aspek pertahanan? Adakah kerjasama lebih lanjut yang dihasilkan antara Indonesia dengan negara asal peserta program IACS?
10. Apakah program IACS berkontribusi pada CBM yang dimiliki Indonesia terhadap pihak internasional?
11. Bagaimana peran IACS dalam mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia internasional?
12. Apa rencana selanjutnya yang mungkin akan diterapkan pada program IACS di tahun-tahun yang akan datang?

**LAMPIRAN 3**  
**PANDUAN WAWANCARA DENGAN**  
**PESERTA PROGRAM IACS**



**DIPLOMASI KEBUDAYAAN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN**  
**KEPENTINGAN NASIONAL DAN PERTAHANAN NEGARA: STUDI**  
**PROGRAM *INDONESIA ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP (IACS)***  
**OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**Panduan Wawancara**

1. Kapan saudara/i mengikuti program IACS ini?
2. Apa yang membuat saudara/i tertarik untuk mengikuti program IACS ini?
3. Sebagai salah satu peserta IACS dari dalam negeri, bagaimana menurut saudara/i antusiasme peserta dari luar negeri dalam mengikuti kegiatan IACS ini?
4. Bagaimana kesan yang saudara/i dapatkan dari program IACS ini? Bagaimana pula kesan peserta luar negeri yang dapat saudara/i lihat dari program IACS ini?
5. Apa saja kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan program IACS tersebut?
6. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program IACS? Jika ada apa saja kendala tersebut?
7. Menurut saudara/i, apa dampak yang dirasakan oleh Indonesia atas diselenggarakannya program IACS ini?
8. Menurut saudara/i, apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam program IACS ini?

9. Bagaimana peran IACS dalam mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia internasional?
10. Menurut saudara/i, apakah program IACS berkontribusi pada CBM (Confidence Building Measure) yang dimiliki Indonesia terhadap pihak internasional?



Wawancara dengan narasumber Arief Ilham Ramadhan, selaku Pejabat Fungsional Diplomat Muda Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, di Gedung Kementerian Luar Negeri RI Jakarta pada 4 Oktober 2018



Wawancara dengan narasumber Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc. Sc selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI pada 12 November 2018 di Gedung LIPI Gatot Subroto, Jakarta



Wawancara dengan narasumber Dr. Hassan Wirajuda selaku Mantan Menteri Luar Negeri RI periode 2001-2009 di Gedung Pusdiklat Kemlu RI Jakarta pada 9 Oktober 2018